DAKWAH POLITIK

(Telaah Aktivitas Dakwah Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019)

TESIS

Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Keislaman
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

Raden Panji Achmad Faqih Zamany
N I M : F02411018

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Raden Panji Achmad Faqih Zamany
N I M	: F02411018
Program	: Magister (S-2)
Institusi	: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2014
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
CB33ADF253232744
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Raden Panji Achmad Faqih Zamany

PERSETUJUAN

Tesis Raden Panji Achmad Faqih Zamany ini telah disetujui

Pada tanggal 25 Juli 2015

Oleh

Pembimbing

Dr. Abdul Muhid M.Si

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Raden Panji Achmad Faqih Zamany ini telah diuji

Pada tanggal 2 september 2015

Tim Penguji :

1. **Dr. Abdul Muhid, M.Si** **(Ketua Penguji).....**
   NIP.197502052003121002

2. **Dr. Agoes Moh.Moefad, SH., M.Si** **(Penguji).....**
   NIP : 197008252005011004

3. **Masdar Hilmy,MA.,Ph.D** **(Penguji).....**
   NIP. 197103021996031002

Surabaya, 8 Oktober 2015

Direktur

Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

ABSTRAKSI

Nama Penyusun : Raden Panji Achmad Faqih Zamany
NIM : F02411018
Judul Tesisi : Dakwah Politik *(Telaah Aktivitas Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019)*

Aktifitas dakwah memiliki peranan yang cukup signifikan dan strategis dalam proses penyebaran ajaran agama Islam. Proses penyebaran dan perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dari peran penting dakwah itu sendiri.. Oleh karena itu, aktivitas dakwah menuntut keterlibatan semua umat Islam dalam berbagai profesi dan keahlian, termasuk para penguasa dan politikus. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, para ulama juga dituntut berdakwah melalui jalur politik yang berbasis agama Islam.Sehingga dakwah dan politik bisa kembali menyatu dalam sebuah konsep yang baru yang penulis kenal sebagai dakwah politik.

Dakwah Politik sebagaimana menjadi judul Tesis penulis di sini dimaksudkan dalam rangka untuk meneliti dan mengkaji bagaimana metode dan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para politisi yang dikalangan masyarakatnya dikenal sebagai ulama, kyai, ustad ataupun santri ketika mereka menjadi anggota parlemen. Khususnya politisi yang duduk menjadi anggota DPRD Jawa Timur yang dalam hal ini menjadi subjek penelitian. Dengan rumusan masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif di mana aktivitas dakwah politik anggota DPRD Jatim menjadi penting untuk dideskripsikan.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahwa metode yang dipakai oleh Anggota DPRD Jawa Timur memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam mensukseskan tujuan dakwah itu sendiri. Para Anggota Dewan sama-sama sepakat menyatakan bahwa dakwah politik merupakan hal yang sangat strategi dalam memberdayakan ummat dan sebagai *sarana amar ma'ruf nahi mungkar.* Dengan menggunakan tiga pilar utama metode dakwah *bil hikmah, bil mujadalah* sebagai metode utama dan dakwah *bil mau'idhah hasanah* sebagai instrumennya, anggota DPRD bisa menyampaikan pesan dakwah dengan berupa bentuk kebijakan-kebijakan, peraturan daerah, dan berbagai macam program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian inilah, penyusun berharap bisa dijadikan referensi tambahan bagi para da'i dam politisi dalam proses aktivitas dakwah politik. Sehingga dengan penelitian ini, bahwa diharapan para da'i muda tidak lagi canggung untuk memasuki arena politik guna memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam, karena politik merupakan media yang cukup strategis guna memberdayakan umat melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk mengatur sistem kehidupan yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera sebagaimana ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Name Authors : Ahmad Faqih Raden Panji Zamany
NIM : F02411018
Thesis Title : Dakwah Politics *(Study Of Activities Dakwah Politik of Political Assembly Members in East Java Period 2014-2019)*

Propaganda activities have a significant role in the process of deployment and strategic Islam. The process of dissemination and development of Islam since the time of the Prophet Muhammad to the present can not be separated from the important role of propaganda itself. Therefore, missionary activity requires the involvement of all Muslims in a variety of professions and skills, including the rulers and politicians. Likewise in the life of the state, the scholars are also required to preach through the Islamic religion-based politics. So that political propaganda and could be reunited in a new concept known as a writer of political propaganda.

Political proselytizing as the title of the author's thesis here is intended in order to investigate and assess how the methods and approaches propaganda made by politicians were among the people known as scholars, clerics, religious teachers or students when they become members of parliament. Especially politicians who sit East Java DPRD members which in this case is the subject of research. With the formulation of the problem, the authors use descriptive qualitative research method in which political propaganda activities legislators Java becomes important to be described.

From the results of this study the authors found that the method used by the Member of Parliament of East Java has an important role in the success and strategic propaganda purposes itself. Members of the House equally agreed stating that political propaganda is very strategic in empowering the ummah and as a means of commanding the good and forbidding unjust. By using the three main pillars method propaganda *bil Hikmah*, *bil Mujadalah* as the main methods and propaganda *bil Mau'idhah Hasanah* as its instrument, legislators can deliver propaganda messages with a form of policies, local regulations, and various community development activities program.

From the results of this study, authors hope could be used as an additional reference for preachers dam politicians in the process of political propaganda activities. So with this study, that it calls the young preachers are no longer awkward to enter the political arena to fight for the values of Islam, because of political is strategic media to empower of people through a variety of policies to manage the system better life , equitable, and prosperous as the teachings of Islam which *rahmatan lil 'alamin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

ABSTRAKSI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 12

C. Perumusan Masalah 14

D. Tujuan Penelitian 14

E. Manfaat Penelitian 15

F. Metode Penelitian 15

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 15

2. Lokasi Penelitian 17

3. Teknik Pengambilan Data 17

4. Teknik Analisis Data 19

G. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Dakwah Dalam Pandangan Politik 23

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Dakwah Politisi 25

3. Nilai Dakwah dalam Peran Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim 27

4. Aktivitas Politik dalam Bingkai Dakwah 29

B. Kerangka Teoritik

1. Komunikasi Dakwah 31

2. Dakwah Sebagai Upaya Menyampaikan Ajaran Islam 41

3. Kajian Teori Politik dan Politik Dalam Islam 67

BAB III AKTIVITAS DAKWAH POLITIK ANGGOTA DPRD JAWA TIMUR

A. Peta Geografis dan Demografis Propinsi Jawa Timur 79

B. DPRD Jawa Timur dan Perannya Dalam Dakwah Politik 81

C. Peta Dakwah Propinsi Jawa Timur 85

D. Peta Politik Jawa Timur 88

E. Profil Informan Anggota DPRD Jawa Timur 89

F. Realitas Dakwah dan Politik Dalam Pandangan Anggota DPRD Jatim. 95

G. Penyajian Data Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim 99

1. Dakwah Politik Dalam Perspektif Anggota DPRD Jatim 99

2. Metode Dakwah Politik 105

3. Pendekatan Dakwah Politik 114

4. Bentuk-Bentuk Dakwah Politik 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA DAKWAH POLITIK ANGGOTA DPRD JAWA TIMUR

A. Temuan Hasil Penelelitian 121

1. Unsur-Unsur Dakwah dalam Dakwah Politik 121

2. Pemahaman Anggota DPRD Jatim Dakwah Politik 131

3. Metode Dakwah dalam Dakwah Politik 133

4. Pendekatan Stuktur dan Kultur dalam Dakwah Politik 136

5. Bentuk-Bentuk Dakwah Politik 138

B. Analisa Data

1. Dakwah Poltitik Sebagai Dakwah Pemberdayaan Umat 140

2. Tiga Metode Dakwah Politik 143

3. Pendekatan Dakwah Politik secara Struktural dan Kultural 146

4. Peraturan Daerah dan Anggaran Dana sebagai Bentuk Dakwah Politik 147

5. Kekurangan Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur 148

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 151

B. Saran 152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas dakwah memiliki peranan yang cukup signifikan dan strategis dalam proses penyebaran ajaran agama Islam. Proses penyebaran dan perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dari peran penting dakwah itu sendiri. Islam melalui dakwah diharapkan mampu melakukan proses internalisasi nilai-nilai Islam sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Pemahaman yang demikian menempatkan dakwah sebagai program besar dan penting atau *azmil umur*. Oleh karena itu, aktivitas dakwah menuntut keterlibatan semua umat Islam dalam berbagai profesi dan keahlian, termasuk para penguasa dan politikus.

Dakwah dalam Islam merupakan manifestasi dari aktualisasi imani (teologis) dalam sistem kegiatan manusia di bidang sosial-kemasyarakatan—termasuk politik—yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi rasa, pikir, sikap dan tindakan manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.[1]

Dakwah menurut Endang Saifuddin dalam bukunya —*Wawasan*

[1] Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam" adalah penjabaran, penerjemahan dan pelaksanaan Islam dalam prikehidupan dan penghidupan manusia (termasuk didalamnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kekeluargaan dan lain sebagainya). Artinya dakwah dalam arti luas adalah seluas kehidupan dan penghidupan itu sendiri.[2]

Secara umum, perintah untuk berdakwah sebenarnya tercantum dalam Al-Quran, sepertih halnya pada Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kalau merujuk pada ayat di atas, Alquran secara imperatif menyuruh umat muslim untuk menyeru umat manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik dan argumentasi yang jitu, sehingga kebenaran agama yang telah diterima bisa dinikmati oleh semua manusia.[3] Karena itulah dalam konteks ini—jika melihat keluasan definisi dakwah—dakwah memerlakukan semua potensi dan media yang ada guna menyampaikan niali-

[2] Syamsul Bahri Day, Hubungan Politik dan Dakwah, *Jurnal Mediator, Vol. 6, No. 1 Juni, 2005*

[3] Syamsul Bahri Day, *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai Islam kepada seluruh umat manusia. Namun tujuan terpenting dari dakwah itu sendiri adalah merupakan ajakan untuk bertauhid kepada Allah. Dimensi pemaknaan atas dakwah juga lebih cenderung pada konsep praktis yang meliputi tabligh keagamaan, propaganda politik, dakwah sebagai aplikasi dari jihad politik, dan akwah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia[4].

Dari pemaparan di atas, dakwah merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mengajak dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Sehingga keberhasilan dakwah tergantung pada beberapa komponen yang mempengaruhinya, yakni da'i sebagai orang yang menyampaikan pesan (komunikator), mad'u sebagai orang yang menerima pesan (komunikan), materi dakwah sebagai pesan yang akan disampaikan, media dakwah sebagai sarana yang akan dijadikan saluran dakwah, metode dakwah sebagai cara yang digunakan untuk berdakwah. Adanya keharmonisan antar unsur tersebut diharapkan tujuan dakwah bisa tercapai secara maksimal. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dewasa ini, komponen-komponen dakwah tersebut juga dituntut mengikuti perkembangan yang berjalan di era modern supaya aktifitas dakwah lebih bisa diterima oleh masyarakat sebagai satu elemen tersendiri bagi proses modernisasi

Oleh karena itu, dakwah secara konseptual harus berdialektika dengan berbagai macam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang cukup komplek. Dalam implementasinya, dakwah membutuhkan berbagai

[4]Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer (aplikasi teoritis dan praktis solusi problematika kekinian),* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam strategi yang tepat sehingga dakwah tersebut bisa sampai dan diterima oleh manusia. Salah satu strategi yang cukup efektif sepanjang sejarah perkembangan Islam adalah dakwah melalui jalur politik. Dengan strategi tersebut mampu membawa agama Islam sebagai salah satu agama yang paling besar di dunia hingga saat ini.

Politik sebenarnya tidak berbeda dengan upaya menata masyarakat, Melandasi masyarakat dengan *akhlakul karimah,* menggugah mereka dengan hilanah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang. Politik juga bertujuan untuk meratakan keadilan, kesejahteraan, dan tolongmenolong, menegakkan kepem.impinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, mencintai dan dicintai umat, menata masyarakat berdasar hukum yang tidak berat sebelah, dan menegakkan martabat manusia yang mulia untuk membina perdamaian dan kemajuan yang bermanfaat.[5]

Dalam Islam politik dikaitkan dengan kekuasaan dan kepemimpinan *(imamah)* dalam suatu negara. Beberapa pandangan tentang hal ini dikemukakan oleh ulama dan pemikir. Dari kalangan Sunni menyebutkan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban, sementara bagi kelompok khawarij pembentukan institusi negara bersifat kebutuhan praktis saja. Sementara berdasarkan ijma' ulama yang mendasarkan ushul fiqh, bahwa suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi. Artinya menciptakan dan memelihara kemashlahatan adalah kewajiban umat, sedangkan sarana untuk

[5] Nahed Nuwairah, Dakwah dan Politik dalam Pandangan Abul A'la Al-Maududi, *Jurnal Al Hadharah Vol. 10, No. 19, Januari-Juni 2011, 28*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkannya adalah negara, maka mendirikan negara juga menjadi wajib (*fardu kifayah*). Negara dianggap mampu menjadi penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan manusia tersebut, hal itu didasarkan pada pendapat Al-Ghazali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu perlunya manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembentukan negara bukan sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dunia semata, tetapi sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat kelak. Lebih tegas, Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara bagaikan saudara kembar yang lahir dari seorang ibu dan keduanya bersifat koplemetaritas.[6]

Secara historis, perkembangan agama Islam memang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh politik yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Dalam artian perkembangan pesat Islam disokong oleh dua konsep (dakwah dan politik) tersebut yang berhasil dipadukan secara apik oleh umat Islam dalam proses penyebaran Islam. Lahirnya Piagam Madinah adalah merupakan salah satu bukti sejarah dari keberhasilan Rasulullah membentuk sebuah negara Islam pertama kali di Madinah. Hal itulah yang menjadi cikal bakal penguasaan umat islam secara politik ke seluruh penjuru dunia dalam beberapa abad kemudian.

Setelah Rasulullah wafat, sistem perpolitikan (pemerintahan) dalam Islam juga terus berlanjut, mulai sistem Kholifah (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), sistem dinasti (Ummayah

[6] Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani : Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan,* (Medan, IAIN Press, 2010), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Abbasiah) hingg sistem kerajaan yang berakhir dengan kerajaan Turki Ustmani. Dalam pada masa-masa tersebut Islam tampil menjadi salah satu kekuatan dunia dan menjadi toggak perkembangan peradaban dunia yang menarik beberapa perhatian para ilmuan dalam beberapa waktu terkahir ini.

Bahkan John L. Esposito dalam bukunya *"Islam and Politics"* menjelaskan bahwa peran politik pada awal Islam mengungkapkan sejarah yang kaya dan kompleks. Umat Islam terbukti menjadikan iman sebagai penggerak dan pemersatu umat untuk mencapai kekuasaan politik. Ajara Islam menjadi ideologi perekat yang mampu motivasi suku Arab untuk bersatu dalam merlakukan ekspansi dan penaklukan untuk mendirikan sebuah sistem kekuasaan yang berlandaskan Islam. legitimasi dan otoritas penguasa, hukum resmi mengakui negara, dan lembaga peradilan, pendidikan, dan sosial yang berakar pada Islam.[7]

Pendekatan dakwah melalui jalur politik dapat dirnanfaatkan sepanjang ia membawa kemanfaatan dalam perkembangan dakwah Islamiyah, sesuai dengan prinsip *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin haruslah berorientasi kepada *kemaslahatan* masyarakat). Pendekatan dakwah melalui jalur politik, menurut Samsul Munir Amin pada dasarnya dilakukan melalui dua strategi; pertama, pendekatan Islam struktural, yakni Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat berdasarkan pada gagasan bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum Islam Kedua, pendekatan Islam kultural, yakni Islamisasi Islam dalam negara

[7] John L. Esposito, *Islam and Politics* (fourth edition), (New York, University Press Syracuse, 1998), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menekankan bahwa negara seharusnya tidak terlalu banyak mengatur bidang kehidupan masyarakat, namun Islamisasi masyarakat dapat melalui berbagai jalur, terutama pemberdayaan masyarakat secara kultural.[8]

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa maju dan mundurnya masyarakat Islam sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya perpaduan antara dakwah dan politik oleh umat Islam. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah Islam, persoalan dakwah dan politik telah menjadi perhatian serius. Sebahagian ulama menganggap bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan lainnya.[9]

Namun, sesungguhnya dakwah dan politik dalam praktek kehidupan sosial harus dipahami dan digambarkan bagaikan dua sisi mata uang. Satu sama lain saling melengkapi, tidaklah dianggap sempurna apabila satu diantaranya tidak ada. Artinya bahwa dakwah dan politik itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Keduanya memiliki titik temu, di mana dakwah dan politik dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan dan perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

Hasan Al Banna mengungkapkan bahwa sedikit sekali orang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali ia memisahkan antara keduanya dan

---

[8] Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah, (*Jakarta: Amzah, 2010), 191-192

[9] Abdul Ghafar Don, *"Integrasi Politik dan Dakwah*" dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed), *Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia,* (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan masing-masing secara independen. Keduanya tidak mungkin bersatu dan dipertemukan. Pada sisi lain sebahagian organisasi Islam yang bergerak dalam aktivitas dakwah dengan tegas mencatumkan bahwa organisasi tersebut tidak berpolitik. Namun dalam prakteknya selalu bersentuhan dan berdimensi politik.[10]

Di Indonesia sendiri, sejarah mengatakan bahwa masuk dan berkembangnya Islam sejak masa Kerajaan Majapahit tak lepas dari kolaborasi antara dakwah dan politik yang dilakukan oleh para ulama' yang waktu itu dikenal dengan Walisongo dalam menyebarkan agama Islam. Seperti halnya Raden Rahmad (Kanjeng Sunan Ampel) yang memiliki kedekatan khusus secara politik dengan Raja Brawijaya V, sehingga kerjaan Majapahit memberikan keleluasaan kepada para ulama waktu itu untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Hingga pada akhirnya Islam pun sendiri berhasil membentuk kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di daerah Demak.

Walisongo akhirnya berhasil menyebarkan Agama Islam secara sporadis dengan berbagai macam metode dan pendekatan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan konteks kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang notabene masih menganut agama Hindu-Budha ketika itu. Keberhasilan tersebut tak lepas dari pola komunikasi dakwah dan politk yang berhasil disatukan oleh para Walisongo dalam upaya menyebarkan agama Islam.

Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam (ulama) ketika zaman

---

[10] Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif,* (Solo: Era Intermedia, 2003), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjajahan, para ulama juga berperan aktif dalam perpolitikan dinegeri ini, seperti halnya KH. Hasyim As'Ari salah satu tokoh terkemuka yang akhirnya mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama, yang merupakan salah satu pelopor pemersatu perjuangan kaum Islam untuk melawan penjajahan ketika itu dengan didampingi oleh ulama-ulama lainnya beliau akhirnya berhasil mengantarkan umat Islam bersatu untuk berjuang dan merebut kedaulatan dengan konsep Resolusi Jihadnya ketika itu.

Kunci keberhasilan dakwah memang tak bisa dilepaskan dari keberhasilan seorang da'i (juru dakwah) dalam memahami konteks kehidupan masyarakat yang menjadi objek dakwah, sehingga apa-apa yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat atau sasaran dakwahnya. Di era modern saat ini, dakwah pun sudah mulai bermetamorfosis dan terus berkembang. Hal ini dilatar belakangi dengan munculnya berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan stratifikasi dan struktur sosial yang ada. Seperti halnya komunitas artis, pengusaha, komunitas politik, komunitas buruh, petani dan lain sebagainya.

Dari berbagai komunitas yang ada tersebut, kebanyakan dari mereka kerap kali memiliki agenda atau program-program yang berisikan dakwah, baik berupa majlis taklim, pengajian rutin, ceramah, dan lainnya. Karena itulah seorang da'i harus benar-benar memahami berbagai macam kelompok masyarakat yang ada demi kepentingan efektifitas dakwah. Disamping itu, saat ini banyak da'i yang juga berasal dari berbagai latar belakang politik, pendidikan, sosial dan budaya. Dakwah sendiri sebenarnya merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban semua muslim, sehingga da'i tidaklah harus di pegang oleh seorang ulama' atau kyai, namun juga seorang yang berlatarbelakang politikus juga bisa menjadi da'i, yang tentunya dengan pendekatan dan metode dakwah yang berbeda dengan da'i pada umumnya.

Seorang politisi partai yang menjadi jadi da'i atau da'i dari kalangan politisi partai memang bukanlah fenomena yang baru. Sejak Islam masuk ke nusantara banyak para da'i penyebar agama Islam yang ketika itu terdiri dari para ulama atau yang dikenal Walisongo memang kerap kali terlibat dalam aktifitas politik pemerintahan. Bahkan mereka mampu mendirikan kerjaan Islam—seperti halnya kerjaan Demak—sendiri yang merupakan pengejewantahan dari betapa peran ulama atau da'i ketika itu cukup signifikan dalam menentukan arah kehidupan masyakat.

Demikian halnya dengan era saat ini, banyak para ulama atau da'i yang juga ikut terlibat langsung dalam perpolitikan negeri ini. Hal ini bisa dilihat dari banyak-banyaknya partai berbasis Islam, seperti PKB, PPP, PKS, PBB dan PAN yang di dalamnya tentunya banyak para ulama, kyai ataupun Ustad yang terlibat aktif dalam partai-partai tersebut, dan tak sedikit diantara mereka yang akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Jatim.

Dakwah Politik sebagaimana menjadi judul Tesis penulis di sini dimaksudkan dalam rangka untuk meneliti dan mengkaji bagaimana metode dan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para politisi yang dikalangan masyarakatnya dikenal sebagai ulama, kyai, atau pun ustad ketika mereka menjadi anggota DPRD Jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itulah dalam tesis ini, peneliti mengambil beberapa politisi partai anggota DPRD Jawa Timur sebagai objek penelitian, di mana, di samping ia sebagai politisi dilingkungan konstituennya ia dikenal sebagai salah seorang da'i atau kyai muda di Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua anggota DPRD Jatim yaitu Baddrut Tamam dan Ahmad Khoiri, keduanya adalah merupakan salah satu tokoh politik muda yang juga sama-sama merupakan sosok seorang kyai di lingkunganya. Politisi yang sekaligus menjadi Kyai selalu menarik untuk dikaji dalam konteks dakwah, kedua hal tersebut kerap kali dianggap sebagai dua peran yang sangat sulit untuk disatukan.

Akan tetapi baik Badrut Tamam ataupun Ahmad Heri telah membuktikan mampu memainkan kedua peran tersebut secara baik. Mereka mampu mengintegrasikan antara peran kyai yang salah satu tugasnya adalah sebagai da'i dan politisi yang tugasnya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Peran tersebut dipadukan dalam sebuah konsep dakwah politik dimana antara kepentingan dakwah dan politik bisa dilakukan oleh figur politisi yang sekaligus menjadi kyai (panutan masyarakat). Kedua konsep tersebut menurut Badrut Tamam dan Ahmad Heri termanifestasi dalam bentuk-bentuk kebijakan yang memihak terhadap kepentingan ummah atau masyarakat. Melihat fenomena itulah, peneliti tertarik untuk mendalami fenomena dakwah politik anggota DPRD Jawa Timur. Sehingga hal itulah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Islam sebagai *Al-Din Allah* merupakan *Manhaj Al-Bayan* atau *Way Of Life*, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan. oleh karena itu ketika komunitas muslim berfungsi sebagai sebuah komunitas yang ditegakkan di atas sendi-sendi, moral iman, Islam dan taqwa dapat direalisasikan secara utuh dan padu karena dia merupakan suatu komunitas yang tidak esklusif karena bertindak sebagai *"Al-Umma Al-Wasalam",* yaitu sebagai teladan di tengah arus kehidupan yang serba kompleks, penuh dengan dinamika perubahan, tantangan dan konflik antar golongan.

Demikian juga Islam di Indonesia, Negara yang dikenal sebagai negara demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahannya tentunya peran di DPRD Jatim cukup penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang bermoral baik, tanpa mengesampingkan perbedaan agama yang ada dikalangan masyarakatnya.

Seorang ulama, kyai atau da'i yang menjadi anggota DPRD Jatim memiliki peran ganda, di samping membuat kebijakan yang adil ia juga harus membuat kebijakan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namun tidak hanya itu, mereka juga harus menjadi teladan yang baik bagi anggota DPRD Jatim mengingat saat ini fenomena prilaku yang tidak amanah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme kerap kali menimpa para wakil rakyat tersebut. Dan tentunya dengan terpilihnya para ulama, kyai ataupun da'i memberikan harapan besar bagi masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang bersih dari sikap dan prilaku tidak terpuji para pejabatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi Masalah

Penelitian yang berjudul *Dakwah Politik (Telaah Aktivitas Dakwah Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019)* ini bermula dari keinginan penulis untuk mengetahui jawaban secara konseptual mengai metode dakwah yang dilakukan oleh anggota parlemen dilingkungan parlemen sendiri. Dalam tesis ini, sebagai Penulis ingin membahas mengenai berbagai metode dakwah dan pendekatan dakwah politik yang dilakukan oleh para politisi anggota DPRD Jawa Timur.

2. Pembatasan Masalah

Dalam konteks penelitian ini, penulis hanya ingin menekankan bahwa peneliti hanya ingin meneliti metode dakwah para politisi anggota DPRD Jawa Timur antar sesama anggota parlemen, dan metode dakwah yang ia lakukan dalam mengawal atau membuat undang-undang atau kebijakan dilingkungan parlemen dengan tetap berpegang pada ruh nilai-nilai Islam.

Metode dakwah yang dilakukan para politisi anggota DPRD Jawa Timur dengan masyarakat atau audiennya tidak berada dalam cakupan penelitian ini. Karena menurut peneliti hal tersebut sudah banyak diteliti dan dikaji oleh beberapa orang dilingkungan akademisi. Di samping itu, mengingat banyaknya aktivitas dakwah, peneliti juga hanya menekankan pada metode dan pendekatan dakwah yang digunakan oleh anggota DPRD Jawa Timur, dan bagaimana cara ia mengkomunikasikan nilai-nilai Islam sebagai ruh dari kebijakan-kebijakan dan aktivitas politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan bahwa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah untuk menguraikan secara konseptual tentang dakwah politik dilingkungan Propinsi Jawa Timur. Dari asumsi-asumsi itulah, muncullah sederet pertanyaan yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimana pemahaman para politisi anggota DPRD Jawa Timur tentang Dakwah Politik?
2. Metode seperti apa yang dilakukan oleh para politisi anggota DPRD Jawa Timur agar dakwahnya bisa diterima oleh anggota parlemen yang lainnya?
3. Pendekatan Dakwah seperti apa yang dilakukan oleh para politisi anggota DPRD Jawa Timur dilingkungan parlemen?
4. Apa saja bentuk-bentuk aktivitas dakwah para politisi anggota DPRD Jawa Timur di Lingkungan Parlemen?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul *Dakwah Politik,* adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman para politisi anggota DPRD Jawa Timur tentang Dakwah dan Politik?
2. Untuk mengetahui metode seperti apa yang dilakukan oleh para politisi anggota DPRD Jawa Timur agar dakwahnya bisa diterima oleh anggota parlemen yang lainnya?
3. Untuk mengetahui pendekatan Dakwah seperti apa yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para politisi anggota DPRD Jawa Timur dilingkungan parlemen.

4. Mengetahui saja bentuk-bentuk aktivitas dakwah para politisi anggota DPRD Jawa Timur di Lingkungan Parlemen?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan metodologi dakwah khsususnya metodologi dakwah ditengah masyarakat yang sedang mengalami konflik ideolgi. Karena tentunya kondisi masyarakat tertentu membutuhkan metode-metode dakwah yang berbeda, serta dibutuhkan pendeketan yang berbeda agar dakwah tersebut bisa diterima oleh masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat untuk untuk memberikan kontribusi teknik dan cara berdakwah yang efektif, khususnya bagi para pelaku dakwah. Sehingga dengan adanya penelitian ini, para da'i bisa mempraktekkan langsung hal-hal yang didapat dalam penelitian ini jika kemudian menemukan kondisi lingkungan dan objek dakwah yang hampir serupa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Fokus penelitian ini adalah proses metode dan pendekatan dakwah secara politik yang dilakukan para politisi anggota DPRD Jawa Timur dalam upaya menerapkan berbagai metode dakwah dalam pentas politik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parelemen Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini berjenis studi kasus, karena peneliti ingin menjelaskan secara detail metode dakwah yang dilakukan oleh para politisi tersebut. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus karena peneliti ingin mengetahui bagaimana metode dakwah yang dilakukan dalam ranah politik di parelemen Propinsi Jawa Timur.[11]

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).[12] Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh *(holistic)*, dinamis dan tidak mengeneralisasi.

Menurut Suprayogo, secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.[13] Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana metode dan pendekatan dakwah politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim, dimana hal tersebut merupakan bagian fenomena sosial yang memerlukan

---

[11] Studi kasus dapat diartikan sebagai: *an intensive, holistic description, and analysis of a single instance, phenomenon, or social unit.* Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya studi kasus adalah suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci atas suatu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. (lihat. Donald Ary, et.al., tanpa judul asli, diterjemahkan oleh Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 449)

[12] Menurut Sukmadinata (2007) , wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkapkan kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti. Wawancara akan dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi ke lapangan. (Lihat. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 112).

[13] Imam Suprayogo, et.al., *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi secara mendalam dan menyeluruh melalui wawancara mendalam dari masing-masing informan kunci/utama agar terlihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, subjek yang diteliti disamping menjadi seorang politisi yang menjadi anggota DPRD di Propinsi Jawa Timur, merupakan salah satu tokoh agama dilingkungannya. Hal itulah yang membuat menarik peneliti untuk menelusuri dakwah politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim yang juga menjadi tokoh agama dilingkungan mereka masing-masing.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini sebenarnya merupakan penelitian prilaku dakwah politik seorang politisi yang juga dikenal sebagai seorang kyai dilingkungan masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini adalah lingkungan parlemen Propinsi Jawa Timur.

3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan.[14] Untuk memperoleh data/keterangan/informasi yang diperlukan. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan baik yang di lakukan

[14] Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penenlitian* (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2002), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu maupun kelompok atau masyarakat tertentu selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau penggalian, kemudian mencatat penemuan yang memungkinkan memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab lisan. Dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dan dapat melihat satu sama lain serta mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.[15]

Interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan pertanyaan yang dilakukan secara sistematis yang berdasarkan kepada tujuan penelitian. Dalam prosedur pengumpulan data–data, ada dua macam panduan wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktural yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan, setelah itu peneliti melakukan wawancara seperti halnya percakapan sehari–hari.

Dalam proses wawancara nantinya, pertanyaan diarahkan pada mengungkapkan konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti. Wawancara akan dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi ke lapangan. Dari wawancara mendalam, peneliti akan menggali informasi lebih jauh mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan:

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset 1990), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan metode wawancara ini diharapkan peneliti memperoleh data yang jelas dan akurat tidak hanya tergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja. Apabila ternyata ada informasi yang perlu diketahui lebih lanjut, peneliti akan mengajukan pertanyaan baru diluar daftar yang telah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pencarian data berupa cetakan, transkrip, buku–buku, surat kabar, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Yang di peroleh peneliti dari lapangan sumber data non manusia merupakan suatu yang sudah tersedia dan peneliti harus pandai dalam memanfaatkan. Kelebihan dalam penggunaan teknik ini adalah karena data sudah tersedia, siap pakai, hemat biaya dan tenaga. [16]

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

[16] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif , yakni dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga titik jenuh.

Terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu:[17]

a. *Data Reduction*/ Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam melakukan reduksi data, peneliti pertama-tama mengelompokkan berbagai macam data-data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini. Hal ini tentunya akan mempermudah peneliti untuk melakukan tahapan olah data selanjutnya, yaitu penyajian data dan analisis data.

b. *Data Display/ Penyajian Data*

Dengan *Data Display* maka peneliti dapat dengan mudah memahami data yang telah diperoleh selama penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk tabel.

---

[17] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (*Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi)* (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Conclusion/ Verification*

Dalam Penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan kosisten saat peneliti kembali ke lapangan maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang kredibel.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menggambarkan; apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*) penelitian ini dijalankan. Dengan demikian, pengguna penelitian ini dapat memiliki gambaran detail mengenai penelitian ini sehingga memudahkan koreksi ataupun mendudukkan penelitian ini sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang maksud penelitian ini diadakan serta masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini beserta nilai pentingnya dan gambaran arah penelitian. Bab pertama tersusun beberapa sub bab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan asumsi-asumsi berupa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang meliputi kajian teori, penjelesan konseptual tentang hal-hal yang berakitan dengan penlitian ini.

Bab III berisi penyajian data, yaitu berisi tentang data untuk menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah. Data inti maupun data untuk memvalidasi. Seperti halnya data tentang aktivitas yang menjadi objek penelitian, metode dan pendekatan dakwah politik yang dilakukan oleh para politisi anggot DPRD Jawa Timur dan data lainnya yang diangggap penting dan berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Analisis ini merupakan pembacaan data yang diuraikan menurut teori yang digunakan. Sehingga dengan analisa tersebut bisa diketahui metode apa saja yang digunakan oleh para politisi anggota DPRD Jawa Timur.

Bab V penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang beisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Dalam bab ini, secara general menjelaskan inti ataupun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustakan

1. Dakwah Dalam Pandangan Politik

Pada dasarnya, dakwah dengan politik murupakan dua hal yang jika diintegrasikan secara nyata akan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang ideal. Dakwah sebagai ruh perkembangan ajaran islam telah memiliki peran yang cukup siginifikan dalam proses penyebaran nilai-nilai ajaran Alquran dan Hadist, sedangkan politik turut serta menjadikan proses dakwah berjalan dengan baik. Dalam konteks inilah Politik menemukan makna substantifnya sebagai upaya menata masyarakat, melandasi masyarakat dengan *akhlakul karimah,* menggugah mereka dengan hilanah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang. Politik juga bertujuan untuk meratakan keadilan, kesejahteraan, dan tolongmenolong; menegakkan kepemimpinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, mencintai dan dicintai umat; menata masyarakat berdasar hukum yang tidak berat sebelah; dan menega.kkan martabat manusia yang mulia untuk membina perdamaian dan kemajuan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, politik adalah kebutuhan manusia dan segala kebutuhan manusia telah ditentukan pola dan nonnanya oleh Islam.[1]

---

[1] Nahed Nuwairah, Dakwah dan Politik Dalam Pandangan Abdul A'la Al Maududi, *Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah, Vol. 10, No. 19, Januari-Juni 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman tentang politik di atas memberikan angin segar bagi masuknya proses dakwah dalam konteks kekuasaan. Dalam memudahkan dakwah Islamiyah agar dapat diterima dan dapat merealisasikan tegaknya nilai-nilai Islam diperlukan strategi yang baik untuk mencapai tujuan dakwah. Salah satu strategi dalam melaksanakan tugas dakwah adalah melalui jalur politik. Dalam hal ini, antara dakwah dan politik mempunyai korelasi yang erat. Dakwah dapat dimaknai sebagai aktivitas menciptakan perubahan pribadi dan sosial yang meliputi segala aspek kehidupan. Sedangkan politik dalam arti yang luas merupakan konsep pengaturan masyarakat.[2]

Menurut M. Amien Rais, politik mestinya berfungsi sebagai alat dakwah yang senantiasa *committed* kepada Allah. Tujuannya bukanlah semata-mata untuk memperoleh kekuasaan, tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni pengabdian kepada Allah. Lebih lanjut menurutnya, suatu tindakan politik adalah baik jika ia berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran *rahmatan lil ,alamîn*.[3]

Melihat penjelasan di atas, dakwah dan politik memiliki titik temu, dimana dalam hal ini, dakwah bisa menjadi kontens atau tujuan dari aktivitas politik, sedangkan politik menjadi media bagi cita-cita dakwah. Sehingga dakwah bisa dilakukan dengan melalui pendekatan politik. Pendekatan dakwah melalui jalur politik dapat dirnanfaatkan sepanjang ia membawa

---

[2] Abdul Muin Salim. (2002). *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran., (*Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 35

[3] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1995), 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan dalam perkembangan dakwah Islamiyah, sesuai dengan prinsip *tasharruf al-imam manuthun bi aimashlahah* (kebijakan pemimpin haruslah berorientasi kepada *kemaslahatan* masyarakat).[4]

Abdul A'la Al Maududi menjelaskan, bahwa untuk memahami dakwah dan politik dapat dimulai dengan memahami bagaimana pandangannya tentang hubungan Islam dan Negara. Dalam pemikiran politiknya, Maududi ingin menghidupkan Islam ke dalam satu sistem pemerintahan. Ini sejalan dengan pemahamannya bahwa Islam merupakan *guidance* dalam berbagai lapangan kehidupan. Pemikiran inilah yang menjadi format konstruktif bagi program transformasi dan sosialisasi, bahkan upaya asimilasi prinsip-prinsip dan nilai *(values)* Islam dalam kehidupan yang diyakininya, dan selanjutnya menjadi obsesi dan motivasi dalam gerakan-gerakan Maududi, baik dalam kancah sosial maupun politik Islam.[5]

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Dakwah Para Politikus

Persepsi masyarakt terhadap aktivitas dakwah para politikus memang sangat sangat beragam, disatu sisi ada yang menanggapi secara positif, sedangkan disisi yang lain menanggapi secara negatif. Hal ini sebenarnya tak lepas dari perbedaan pandangan masyarakat ketika melihat relasi antara agama dan negara ataupun dakwah dan politik. Sebagian ulama menganggap bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan

[4] Samsul Munir Amin, *Opcit,* 187
[5] Nahed Nuwairah, Dakwah dan Politik...*Opcit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan lainnya.[6]

Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat prilaku para politisi yang kerap kali terlibat kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme hal tersebut akan mencoreng nilai-nilai dakwah. Tokoh-tokoh politik hanya dekat dengan rakyat menjelang pemilihan umum (PEMILU) demi kepentingan kekuasaan. Realitas politik memang selalu diwarnai dengan tontonan yang bersifat negatif dalam pandangan masyarakat. Sementara aktivitas dan topik dakwah tidak banyak menyentuh ranah politik.[7]

Dalam pandangan Kuntowijoyo. Ia mengatakan bahwa Islam dimaknai dan dipahami sebagai persoalan individual dan melupakan kalau Islam sebenarnya agama sosial. Padahal Islam menekan kesadaran melakukan aksi bersama untuk mewujudkan kebaikan. Kuntowijoyo secara tegas menyatakan pentingnya kesadaran kumunitas dan bekerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk mewujudkan hal itu adalah melalui aktivitas politik dalam wadah sebuah negara.[8]

Problem itulah yang menurut Ibnu Hajar dalam bukunya "Kiai di Tengah Pusaran Politik" menyatakan bahwa pada dasarnya kiai merupakan

---

[6] Abdul Ghafar Don, *Integrasi Politik dan Dakwah* dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed), *Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), 13

[7] Paisol Burlian, Harmonisasi Jalinan Dakwah dan Politik Hukum Tata Negara, *Jurnal Wardah : No. XXVII/Th. XV/ Juni 2014. 17-31*

[8] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosok yang dihormati dan di segani, ia merupakan pemimpin yang kharismatik yang memiliiki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Namun ketika ia terjun dalam ranah politik praktis, tak sedikit yang dari para kiai tersebut yang mendapatkan kecaman dan tanggapan negatif oleh santri dan masyarakat.[9]

3. Nilai Dakwah dalam Peran Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim

Dakwah dan politik pada dasarnya sama-sama memiliki nilai *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam upaya menegakkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Karena itulah seorang anggota DPRD yang merupakan bagian dari pengelalola negara hendaknya mengamban amanah nilai tersebut dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Hal ini tak lepas dari kewajibannya (DPRD) sebagai wakil rakyat. Quraish Shihab, kewajiban negara (pemerintah) adalah menerapkan nilai-nilai agama dalam rangka menata kehidupan masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad membangun negara Madinah. Universalitas nilai-nilai agama harus mampu memajukan dan memperkukuh integritas, kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia yang majemuk, suku, agama dan ras. Hal yang utama bukanlah formalisasi ajaran agama kedalam kehidupan sosial politik, melainkan bagaimana nilai-nilai agama dapat terinternalisasikan dalam kehidupan riil bernegara, seperti keadilan, musyawarah, toleransi, terpenuhi hak dan kewajiban, amar ma"ruf dan nahi

[9] Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2009) Cet. Ke-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munkar, kejujuran, serta penegakan hukum dan sebagainya.[10]

Hakikatnya, menurut konsep Islam, politiklah yang sepatutnya menjadi alat untuk mengembangkan dan mensukseskan dakwah. Menurut Ali Sodiqin bahwa strategi penyampaian dakwah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kekuatan politik umat Islam dan antara kekuatan politik dan penyebaran agama menyatu dan bersinergi.[11]

Secara lebih spesifik dakwah menurut Abd. Munir Mulkhan adalah sebuah upaya merubah umat dari suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik di dalam segala segi penghidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam didalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi penghidupan seorang pribadi, penghidupan keluarga maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan tata penghidupan bersama.[12]

Ibn Khaldun (1332-1406 M) menyatakan bahwa pemerintah akan lebih berwibawa jika pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Bahkan hal tersebut akan bertahan apabila dalam pelaksanaannya mengikut nilai-nilai kebenaran, kerana hati manusia hanya dapat disatupadukan dengan pertolongan Allah Swt. Kekuasaan yang berasaskan agama akan menjadi kokoh kerana mendapat dukungan rakyat. Selain itu agama dapat meredakan pertentangan dalam masyarakat dan rasa iri hati

---

[10] Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*,(Medan: IAIN Press, 2010), 64-65

[11] Ali Sodiqin, *Antropologi al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 83

[12] Abdul Munir Mulkhan., *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: Sipress, 1993), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk terwujudnya persaudaraan sejati.[13]

4. Aktivitas Politik dalam Bingkai Dakwah

Konsep politik dalam Islam secara jelas diungkapkan dalam teks-teks Alquran yang menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, amar ma"ruf dan nahi mungkar, kejujuran, amanah serta penegakan hukum. Selain itu, konsep-konsep dan dasar-dasar politik dalam Islam juga dapat dilihat dari praktek politik Nabi Muhammad SAW dalam penyelengaraan pemerintahan Islam, yaitu tentang bagaimana beliau ketika menjalankan fungsi pemerintahan di Madinah[14].

Dakwah Nabi SAW. Juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Dakwah yang dilakukan oleh Beliau dan para Sahabat, selain bersifat ritual, spiritual dan moral, juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Di antara hal-hal yang menunjukkan hal tersebut adalah: Dakwah Nabi saw. Menyerukan pengurusan masyarakat *(ri,,âyah syu'ûn al-ummah)*. Ayat-ayat Makiyyah banyak mengajari akidah seperti takdir, hidayah dan *dhalâlah* (kesesatan), rezeki, tawakal kepada Allah. Ratusan ayat berbicara tentang Hari Kiamat (kebangkitan manusia dari kubur, pengumpulan manusia di padang mahsyar, pahala dan dosa, surga dan neraka, dan lainnya); tentang pengaturan terkait akhirat seperti nasihat dan bimbingan, membangkitkan rasa takut

[13] Charles Issawi, *An Arab Philosophy of History*. (Terj.) A. Mukti Ali. (Jakarta: Tintamas, 1976), 180.

[14] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap azab Allah, serta memberikan semangat untuk terus beramal demi menggapai ridla-Nya.[15]

Pemerintahan negara Madinah kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar Ibn al-Khattab, Usman Ibn „Affan dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Corak pemerintahan yang dipraktekkan dimasa itu sedikit berbeda dengan Nabi, yaitu mengambil bentuk aristokrat demokratik. Meskipun terjadi banyak konflik politik dimasa itu, akan tetapi secara konsisten pemerintahan Islam pada masa khulafa ar-rasyidin tetap menjaga warisan tradisi kepemimpinan Rasullullah Saw. untuk selalu menegakkan keadilan, musyawarah, toleransi dan nilai-nilai moral Islam lainnya. Selanjutnya pasca kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah yang menunjukkan pasang surutnya pemerintahan Islam. Sejarah mengungkapkan bahwa pemerintahan tetap konsisten mengedepankan nilai moralitas.[16]

Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut di atas, setidaknya telah memberikan gambaran bahwa Islam sejak kelahirannya telah mengenal bentuk pemerintahan atau sudah menerapkan suatu sistem politik. Sistem demokratis maupun oligarki atau kerajaan tidak menjadi persoalan sebab Islam dapat menerima bentuk dan sistem pemerintahan apapun sepanjang hal

[15] Paisol Burian, *Harmonisasi Dakwah.....Opcit.*
[16] Sofyan, *Etika Politik.....Opcit*, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin serta mampu mewujudkan rasa aman, damai sejahtera.[17]

M. Imdadun Rahmat, dalam bukunya *"Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen"* menyatakan bahwa dakwah politik yang menjadi landasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui bahwa aktivitas dakwah tak bisa dilepaskan dari aktivitas politik. Peran anggota DPR/DPRD sangat urgen dalam mewarnai percaturan politik dan kebijakan pemerintah yang kental dengan nuasa islam.[18]

B. Kerangka Teoritik

a) Komunikasi Dakwah

Aspek terpenting dalam dakwah adalah masalah komunikasi. Karena secara definitif dakwah merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Dakwah yang berhasil jika dapat dikomunikasikan dengan baik. Kemampuan berkomunikasi ini memang harus dimiliki oleh setiap da"i (juru dakwah) sehingga pesan-pesan dakwah yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. .

Secara etimologi sendiri, dakwah memang memiliki arti yang selaras dengan komunikasi, dakwah dapat dimaknai dengan berbagai aneka ragam makna seperti memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon,

[17] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 270.

[18] M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen,*(Yogyakarta, LkiS, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.[19] Sehingga secara sederhana dakwah bisa di artikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan tertentu berupa ajakan, seruan dan undangan, untuk mengikuti pesan tersebut atau menyeru dengan tujuan untuk mendorong seseorang supaya melakukan cita-cita tertentu.[20]

Istilah Komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut *communication* berasal dari bahasa latin *communication,* yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. *Sama* di sini maksudnya adalah *sama makna.*[21]

Sama makna yang dimaksud di atas adalah kesamaan pemaknaan terhadap bahasa yang digunakan oleh orang yang sedang berkomunikasi tersebut. Jadi intinya komunikasi itu terjadi apabila dua orang yang sedang berbicara dengan menggunakan bahasa yang sama dan makna yang sama. Karena penggunaan bahasa yang sama dalam komunikasi belum bisa dikatakan efektif apabila memiliki perbedaan makna.

Komunikasi adalah *the process by which an individual (the communicator) transits stimulus (usully verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience),* itulah kata Hovland dan Jenis Kelly sebagaimana di kutip oleh Samsul Munir Amin dalam bukunya, ketika

---

[19] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progressif, 1997), 406.

[20] Ahmad Subandi, *Ilmu Dakwah Pengantar ke Arah Metodologi* (Bandung: Yayasan Syahida, 1994), 10.

[21] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, (Bandung : PT Remaja Rasdakarya, 2005) Cet.19, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan komunikasi secara terminologi. Baik Hovland ataupun Jenis Kelly sama—sama menyepakati bahwa komunikasi cenderung pada suatu proses, yakni proses pengalihan stimulus pada orang lain dengan tendensi adanya perubahan tingkah laku *(to modify the behavior of other individuals)* sebagai responnya.[22]

Para pakar banyak yang memberikan definisi yang berbeda-beda tentang komunikasi, walaupun secara prinsip memiliki banyak kesamaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Deddi Mulyana dalam sebuah bukunya mengatakan setidaknya ada tiga kerangka konseptual untuk memahami komunikasi yaitu meliputi komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai tansaksi.[23]

Pertama, Komunikasi sebagai tindakan satu arah mengisyaratkan bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan seoarah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (atau sekelompok orang) lainnnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media. Pola komunikasi seperi ini biasanya digunakan dalam pidato, ceramah ataupun lainnya yang tidak melibatkan tanya jawab. Konseptualisasi komunikasi semacam ini sebenarnya lebih menyoroti penyampaian pesan yang efektif dan mengisyaratkan bahwa semua kegiatan komunikasi bersifat instrumental dan persuasive. Beberapa tokoh yang memberikan definisi komunikasi yang

[22] Samsul Munir Amin, *Opcit*, 145

[23] Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, cet. Ke-14, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan konsep ini diantaranya adalah :

- *Everett M. Rogers* mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.
- *Raymond S Ross* menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator.
- Sedangkan *Bernard Berelson* dan *Gary A Stainer* mendefinisikan Komunikasi sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, dengan menggunakan symbol-simbol—kata-kata, gambar, figure, grafik, dan sebagainya.
- Sementara bagi Harold Laswell cara yang baik untuk mengambarkan komunikasi adalh dengan menjawab pertanyaan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana.[24] Dari pengertian yang diberikan oleh Harold Laswell inilah kemudian komunikasi diturunkan pada lima unsur pokok yang harus terkandung di dalamnya, yaitu meliputi, pertama Sumber *(Source)*, Pengirim *(Sender),* Penyandi *(Encoder),* Komunikator *(Communicator),* Pembicara *(Speaker)* atau Orator. Sedangkan unsur yang kedua yaitu meliputi Pesan, yaitu apa

[24] Deddy Mulyana. *Ibid*, 68-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Ketiga, saluran atau media, yakni alat atau wahana yang dijadikan sumber untuk menyampaikan pesannya. Yang keempat adalah penerima *(receiver),* dan yang ke lima adalah efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut.

Kedua, komunikasi dapat dipahami sebagai interaksi, komunikasi di sini dipahami bahwa dalam arti sempit interaksi adalah sling mempengaruhi *(mutual influence).* Pandangan komunikasi semacam ini kerap kali menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Dan konsep ini dipandang sebagai sautu konsep yang cukup dinamis, dimana didalamnya terjadi umpan balik *(feed back)* antara komunikan dan komunikator. Konsep komunikasi semacam ini biasanya terjadi dalam dialog, diskusi, dan forum-forum tanya jawab atau percakapan sehari-hari.

Ketiga, komunikasi dipahami sebagai transaksi. Dalam konteks ini komunikasi adalah proses persola karean makna atau pemahaman yang diperoleh pada dasarnya bersifat pribadi. Komunikasi dalam konsep ini juga bersifat intersubjektif, karena di dalamnya baik komunikan ataupun komunikator sama-sama memberikan penafsiran secara verbal saja, namun juga menafsirkan prilaku non verbalnya. Penafsiran tersebut itulah kemudian bisa mengubah penafsiran orang yang diajak komunikasi sehingga di dalamnya terjadi proses transaksi pemahaman melalui penafsiran-penafsiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimiliki oleh komunikan dan komunikator dimana keduanya pun dalam proses tersebut saling mempengaruhi. Sehingga komunikasi transaksional itu dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan prilaku orang lain, baik prilaku verbal ataupun non verbalnya.

Komunikasi meruapakan sesuatu yang fitrah bagi manusia, sejak manusia berada dalam rahim ibunya, ia telah berkomunikasi dengan cara-cara tertentu dengan ibunya, demikian juga ketika ia lahir, dengan isyarat-isyarat tertentu bayi manusia tersebut melakukan komunikasi untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, kondisinya, kebutuhannya dan lain sebagainya.

Dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan bahwa Dia-lah yang mengajarkan manusia berkomunikasi, mengenal nama-nama dan lain sebagainya. Hal ini tersirat dalam firmannya yaitu :

ٱلرَّحۡمَٰنُ ١ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ٤

Yang artinya : (Tuhan) yang Maha pemurah, Yang Telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. (QS. Ar-Rahman : 1-4)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa komunikasi memang merupakan sesuatu yang fitrah dan urgen bagi manusia. Bahkan dengan bekal "berbicara" itulah manusia bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Karena itulah sejak adam di ciptakan Allah pun sudah mengajarkan kepadanya beberapa nama-nama benda, sebagaimana di jelaskan dalam ayat :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ
هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ
إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم
بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا
تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya tujuan dari komunikasi, dan apa fungsi komunikasi bagi manusia? Gordon I Zimmerman *et al* sebagaimana di kutip oleh Deddi Mulyana membagi tujuan komunikasi dalam dua kategori besar yaitu pertama, tujuan dari komunikasi adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan manusia. Sedangkan yang Kedua untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain[25].

Namun menurut Harold D Lasswel Tujuan komunikasi disini menunjuk

[25] Deddy Mulyana, *Opcit*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suatu harapan atau keinginan yang dituju oleh pelaku komunikasi. Secar umum menyebutkan bahwa tujuan komunikasi ada empat, yaitu :[26]

a. Mengubah sikap (*to change the attitude*). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam pembahasan fungsi komunikasi, adalah mempengaruhi seseorang. Tahap selanjutnya setelah seseorang terpengaruh ia akan merubah sikapnya. Inilah salah satu tujuan komunikasi. Mengubah sikap seseorang menjadi suatu sikap yang diharapkan oleh si pemberi informasi.
b. Mengubah opini/pendapat/pandangan (*to change the opinion*). Salah satu tujuan komunikasi adalah mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak tertentu.
c. Mengubah perilaku (*to change the behaviour*). Mengubah perilaku seseorang sesuai dengan informasi yang telah diberikan sehingga berperilaku sesuai yang diharapkan oleh si pemberi informasi.
d. Mengubah masyarakat (*to change the society*). Apabila dalam point di atas perilaku dititikberatkan lebih kepada individu, dalam point ini, perubahan dititikberatkan pada suatu kelompok yang bersifat lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Sehingga perubahan terjadi secara masal.

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya sebagai pertukaran berita atau pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, ide, maka fungsinya dalam

[26] Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap sistem sosial adalah sebagai berikut:[27]

a. Informasi: pengumpulan, penyimpanan, pemorsesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
b. Sosialisasi: menunjuk pada upaya pendidikan, dimana adanya penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagaimana anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif didalam masyarakat.
c. Motivasi: menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang untuk menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
d. Perdebatan dan diskusi: menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah public, menyediakan bukti-bukti relavan yang diperlukan utuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
e. Pendidikan: pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong

[27] Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk keterampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.

f. Memajukan kebudayaan: menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horison seseorang serta membangun imajinasi dan mendorong kreatifitas dan kebutuhan estetikanya.

g. Hiburan: memberikan hiburan kepada masyarakat, lewat penyebarluasan signal, simbol, suara dan imajinasi dari drama, tari, kesenian, kesusatraan, music, olahraga, kesenangan, kelompok dan individu, melalui media masa, eltronik dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan, dan melarikan diri dri kesulitan hidup sehari-hari, dan lain-lain.

h. Integrasi: menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain.

Dari beberapa pengertian komunikasi di atas dapat di pahami bahwa pada dasarnya, dakwah dan komunikasi memang dua hal yang berbeda, namun secara prinsip keduanya merupakan aktifitas yang sama. Karena aspek komunikasi lebih umum dari dakwah jika dilihat dari sisi tujuan dan fungsinya. Artinya adalah dakwah merupakan bentuk komunikasi yang memiliki ciri khas tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bisa dilihat dari sisi tujuan misalnya, komunikasi secara umum adalah mengharapkan adanya partisipasi komunikan atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator sehingga terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. Di dalam dakwahpun demikian adanya, seorang da‟‟i dimana dalam konteks komunikasi disebut sebagai komunikator mengharapkan adanya respon dan partisipasi dari pihak komunikan (mad‟‟u) dengan harapan bahwa mad‟‟u bisa berubah sikap dan perbuatan sesuai dengan apa yang disampaikannya.

Dari itulah cirri khas yang membedakannya adalah pada pendekatan yang dilakukan secara persuasive, dan bertujuan akan adanya perubahan atau pembentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Atas dasar inilah dikatakan bahwa dakwah merupakan proses komunikasi tetapi tidak semua komunikasi di sebut sebagai dakwah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek yang meliputi, siapa pelakunya *(communikator)*, apa pesannya *(message)*, bagaimana caranya *(approach)*, apa tujuannya *(destination)*, dan siapa penerimanya *(communikan)*.[28]

b) Dakwah Upaya Menyampaikan Ajaran Islam

Dakwah secara bahasa sebagaimana telah dijelaskan diatas berasal dari akar kata dalam bahasa arab *da‟‟a-yad‟‟u-da‟‟watan* yang memiliki ragam makna seperti memanggil, menyeru, mengajak, menganjurkan, mengundang

[28] Samsul Munir Amin, *Opcit,* 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dalam ajaran agama Islam. Namun secara terminilogis banyak pakar memiliki definisi yang berbeda-beda walaupun pada prinsipnya memiliki beberapa kesamaan.

Syek Ali Mahfudz yang lebih menekankan definisi dakwah pada aspek proses anjuran atau pemberian motivasi kepada manusia dalam mengikuti ajaran agama Islam. Menurutnya dakwah merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran manusia dalam mengajak pada kebaikan dan bimbingan untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah mereka dari pebuatan yang *munkar* agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.[29]

Sayyid Mutawakkil sebagaimana dikutip oleh Enjang dan Aliyuddin dalam bukunya menyatakan bahwa dakwah adalah mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menjalankan kebaikan dan menunjukkannya ke jalan yang benar dengan menegakkan budaya dan menghindarkan mereka dari penyakit social.[30]

Sedangkan Ahmad Syafi"i Ma"arif mengartikan dakwah Islam merupakan suatu usaha atau kerja bagaimana berdakwah itu dapat menggarami kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai Iman, Islam dan Takwa demi kebahagiaan kita di masa kini dan masa nanti.[31]

Toha Yahya Omar, ia mendefinisikan dakwah sebagai upaya untuk

---

[29] Syaikh Ali Mahfudz, *Hidaya al-Mursidin*, lihat juga dalam Abdul Kadir Sayid Abd. Rauf, *Dirasat fi da'wah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Tiba"ah al-Mahmadiyah, 1987) 10.

[30] Lihat Ali bin Shalih al Mursyid, *Mustalzamat al-Da'wah fi al-,Ashr al-Hadhir*, (Beirut: Dar al-Fikr 1989) 21, Lihat juga Enjang dan Aliyuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Bandung: Widya Padjdjaran, 2009), 9.

[31] Ahmad Syafi"I Ma"arif, *Membumikan Al-Qur'an, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.[32]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Aziz, ia mendefinisikan dakwah sebagai proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. ”Proses” menunjukan kegiatan yang terus-menerus, berkesinambungan, dan bertahap. Peningkatan adalah perubahan kualitas yang positif: dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Peningkatan iman termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran dan perbuatan.[33]

M. Quraish Shihab, ia mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada siatuasi yang lebih baik dan sempurna terhadap pribadi amupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkahlaku dan padangan saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi sekarang ini ia harus lebih berperan emnuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek.[34]

Dari beberapa definisi tentang dakwah di atas penulis sendiri mendefinsikan bahwa dakwah merupakan upaya seseorang untuk mengajak, menyeru, dan menganjurkan, orang lain untuk mengikuti tuntunan dan ajaran

---

[32] Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1979), 1.
[33] Moh. Ali Aziz, Ilmu *Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 19-20.
[34] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan 22, (Bandung : Mizan, 2001), 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam dalam segala aspek kehidupannya baik dalam aspek agama, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik sehingga bisa menciptakan kehidupan yang ma"ruf dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Melihat definisi di atas, dakwah Islam dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan yang meliputi semua dimensi kehidupan manusia, yang berhubungan dengan *amar ma"ruf* dan *nahyi munkar.* Karena itu, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial pendidikan dan lain sebagainya merupakan bagian atau bisa dijadikan bagian dari kegiatan dakwah.

a. Bentuk dan Konteks Dakwah

Dakwah sekarang dipahami bukan hanya sebagai proses penyampaian pesan Islam dalam bentuk ceramah, khutbah atau yang bisa dilakukan para penceramah atau mubaligh. Menurut Enjang dan Aliyudin (2009) mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan kajian keilmuan, dakwah dapat di kategorisasikan dalam empat bentuk yaitu:[35]

1) *Tabligh* Islam

Dalam pandangan Muhammad A"la Thanvi, seorang leksikograf abad kedelapan belas India. Tabligh sebagai sebagai sebuah istilah dalam ilmu retorika, yang didefinisikan sebagai pernyataan kesastraan (*literary claim)* yang secara fisik maupun logis dalm tabligh memiliki aspek yang berhubungan dengan kepiawaian penyampaian pesan

[35] Enjang As dan Aliyuddin, *opcit,* 53-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam merangkai kata-kata yang indah yang mampu membuat lawan bicaranya terpesona. Sedangkan dalam konsep Islam, tabligh merupakan salah satu perintah yang dibebankan kepada para utusan-Nya. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah beliau menerima risalah (ajaran kerosulan yang diwahyukan) dan di perintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia, yang selanjutmya tugas ini diteruskan oleh pengikut dan penerusnya.

2) *Irsyad* Islam

Irsyad secara bahasa bearti bimbingan, sedangkan irsyat secara istilah adalah proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Jika dilihat dari prosesnya *irsyad* bersifat kontinu, simultan dan intensif.

3) *Tadbir* Islam

Tadbir menurut bahasa berarti pengurusan, pengelolahan (manajemen). Menurut istilah adalah kegiatan dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalui kegiatan aksi amal shaleh berupa penataan lembaga-lembaga dakwah dan kelembagaam Islam. Fungsi-fungsi manajemen merupakan karakteristik menonjol dalam dakwah tadbir.

Tadbir Islam, didalamnya berisikan pelembagaan dan pengelolahan kelembagaan Islam, seperti majelis taʿlim, taʿmir masjid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi *siyasah* Islam, wisata religius Islam (haji, umroh, dan ziarah) dan sumber dana Islam berupa ZIS (zakat, infak, shadaqoh) dan LSM dakwah.

4) *Tathwir* Islam

Tathwir menurut bahasa berarti pengembangan, menurut istilah bearti kegiatan dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalui aksi amal shaleh berupa pemberdayaan *(tagbyir, tamkin)* sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan, dan ekonomi ummat dengan mengembangkan prantara-prantara sosial, ekonomi, dan lingkungan atau pengembangan kehidupan muslim dan aspek-aspek kultur universal.

Adapun Konteks dakwah dalam pengertian ini adalah interaksi da‟i dengan mad‟u dalam proses dakwah dilihat dari segi kuantitatif (jumlah) atau kualitatif, dalam arti bagaimana kondisi dan seberapa banyak jumlah mad‟u yang terlibat dalam proses dakwah tersebut. Dengan kata lain disebut juga "level dakwah" yaitu tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan dakwah dilihat dari jumlah serta kondisi dan situasi mad‟unya. Hal ini dapat dikategorikan dalam beberapa level atau konteks yaitu:[36]

1) Dakwah *Nafsiyah*

Dakwah *nafsiyah* secara sederhana dapat diartikan dakwah

[36] Enjang As dan Aliyuddin, *opcit,* 64-72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada diri sendiri (intrapersonal), sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun kualitas dan kepribadian diri yang Islami. Menjaga diri sendiri merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan sebagaimana petunjuk surat Al-Tahrim ayat 6,[37] dan merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap dirinya. Dakwah *nafsiyah* dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu, membaca, *muhasabah al-nafs* (instropeksi diri) taqarup melalui *dzikr al-lah* (mengingat allah), *du'a* (berdo"a), *wiqayah al-nafs* (memelihara pencerahan jiwa), taubat, shalat, dan *shaum* (berpuasa), mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya, meningkatkan ibadah, dan lain-lain.

Dengan kata lain dalam dakwah *nafsiyah* terjadi proses internaslisasi ajaran Islam yaitu proses tahu-kenal dan mengamalkan ajaran Islam pada tingkat intra-individu muslim (*nafsiyyah*). da"i dan mad"u pada proses internalisasi ajaran Islam adalah diri sendiri sebagai individu muslim yang di dalam dirinya memiliki *ilham fujur* dan *ilham taqwa*. dengan demikian, internalisasi ajaran Islam adalah proses peningkatan potensi *ilham taqwa* dan mengurangi potensi *ilham fujur.* hal seperti inilah yang disebut *innani min al-muslimin, mukhbithin*, dan *min amrina rasyada.*

2) Dakwah *Fardiyah*

[37] Terjemahan Al-Quran "*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah *fardiyah* adalah proses ajakan atau seruan kepada jalan allah yang dilakukan oleh seorang da‟‟i kepada perorangan (interpersonal), yang dilakukan secara langsung tatap muka (*face to face*), atau langsung tetapi tidak tatap muka (bermedia) yang bertujuan memindahkan mad‟‟u pada keadaan yang lebih baik dan diridhai allah. selain itu shaqr mengemukakan definisi dakwah fardiyah ialah penyampaian ajaran agama Islam yang ditujukan kepada seseorang secara berhadapan dan bisa terjadi dengan dirancang terlebih dahulu.

Tahapan dakwah *fardiyah* ini diantaranya: Pertama*, Mafhum Fakwah* adalah usaha untuk diturunkan ke jalan allah. Kedua*, Mafhum Haraki* (gerakan) adalah menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih dekat, menampakkan kecintaan dan perhatian. Ketiga*, Mafhum Tanzimi* meliputi: pengarahan (*tanzih*) berupa bimbingan seorang da‟‟i kepada mad‟‟u dalam rangka berdakwah kepada alah untuk membantu memahami keadaan dirinya, memahami persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya, menunjukkan cara halus tentang kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. penegasan (*tanzif*): dalam hal ini da‟‟i membantu penerima dakwah untuk menentukan tempatnya dalam alam Islami serta menunjukan kepadanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di posisi ini. penggolongan (*tashzif*); pengelompokan sesuatu agar mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakannya antara satu dengan yang lain.

3) Dakwah *Fi"ahQalilah*

Dakwah *fi"ah qalilah* adalah dakwah yang dilakukan seorang da"i terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon mad"u terhadap da"i dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Term *fi"ah*diadopsi dari Q.S al-baqarah (2) ayat 249. termasuk dakwah *fi"ah* diantaranya dakwah dalam lingkungan keluarga (usrah), sekolah (madrasah), majelis ta'lim, pesantren (ma"had), dan pertemuan atau majelis lainnya.

4) Dakwah *Hizbiyah* (jama"ah)

Dakwah Hizbiyah adalah proses dakwah yang dilakukan oleh da"i yang mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah tertentu, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang lain di luar anggota suatu organisasi tersebut. Term hizbiyah diadopsi dari Q.S al-madinah (5) ayat 56. termasuk dakwa hizbiyah diantaranya dakwah yang berlangsung pada kalangan organisasi NU, Muhammadiyah, persis, dan lain-lain. Dakwah *hizbiyah* dipahami juga sebagai uoaya dakwah melalui organisasi atau lembaga keIslaman, dlam pemahaman ini dakwah *hizbiyah* merupakan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam upaya mengarahkan mad"u pada perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dakwah *Ummah*

Dakwah Ummah adalah proses dakwah yang dilaksanakan pada mad‟u yang bersifat massa (masyarakat umum). dakwah ini dapat berlangsng secara tatap muka dan biasanya monologis, seperti ceramah umum (*tablig akbar*), atau tidak tatap muka seperti menggunakan media massa (baik cetak atau eletronik).

Dakwah *ummah* model dakwah yang lebih modern karena banyak menggunakan media. seperti TV, radio¸sampai handphon. seorang da‟‟i harus mengerti kondisi perkembangan yang ada di masyarakat setempat untuk memudahkan dakwah mudah di terima diberbagai kalangan masyarakat.

6) Dakwah *Syu'ubiyah Qabailiyah* (dakwah antar suku, budaya dan bangsa)

Dakwah *syu'ubiyah qabailiyah* adalah proses dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku atau antar budaya (da‟‟i dan mad‟u yang berbeda suku dan budaya dalam kesatuan bangsa atau berbeda bangsa). Dakwah *syu'ubiyah qabailiyah* ini sudah banyak terjadi di indonesia yang memang mempunyai banyak budaya, suku-suku, serta bangsa-bangsa yang berbeda-beda tentunya seperti yang dilakukan oleh para wali zaman dulu yang menyebarkan agama Islam melalui budaya yang ada di daerah setempat. Dengan kekayaan budaya, suku dan bangsa ini da‟‟i untuk mengajak, menyeru dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan harus mempunyai kepekaan yang baik. menjaga perbedaan tersebut tetap dalam satu tujuan.

b. Pendekatan Dakwah

Efektifitas dakwah bisa dicapai tidak hanya dengan menggunakan metode yang tepat, namun juga harus juga menggunakan pendekatan yang tepat. Pendekatan dalam dakwah ini sangat penting untuk dipahami agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan bisa diserap dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat.

Pendekatan dakwah secara garis besar bisa dibagi kedalam dua aspek, yaitu pertama, Pendekatan dakwah structural, dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Dakwah structural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi yang ada, guna menjadikan Islam sebgai ideology negara, sehingga nilai-nilai Islam mengejewantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan relegius, dimana harus ada para politikus dalam legeslatif yang membuat undang-undang untuk menjamin kehidupan yang islami.[38]

Sedangkan yang kedua adalah Pendekatan dakwah kultural Dakwah kultural adalah, pertama, dakwah yang bersifat akomodatif terhadap nilai

[38] Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2004), 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan; kedua, menekankan pentingnya kearifan dalam memahami kebudayaan komunitas tertentu sebagai sasaran dakwah.

Muhammad Shulton berpendapat bahwa dakwah kultural adalah, aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural, adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doctrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan Negara.[39]

c. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (penerima dakwah), *maudu'* (Pesan dakwah), Uslub (metode dakwah), *wasilah al-dakwah* (media dakwah), *mad'u* (objek dakwah), dan tujuan dakwah.[40]

1) Da'i (pelaku dakwah)

Kata *da'i* ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran Islam) namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran

[39] Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 30.
[40] Enjang As dan Aliyuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Bandung: Widya Padjdjaran, 2009), 73-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhutbah), dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pengertian para pakar dalam bidang dakwah, yaitu:

a) Hasyimi, juru dakwah adalah penasihat, para pemimpin dan pemberi ingat, yang memberi nasihat dengan baik yang mengarah dan berkhotbah, yang memusatkan jiwa dan raganya dalam *wa'ad* dan *wa'id* (berita gembira dan berita siksa) dan dalam membicarakan tentang kampung akhirat untuk melepaskan orang-orang yang karam dalam gelombang dunia. [41]
b) Nasaraddin Lathief mendefinisikan bahwa da'i itu ialah Muslim dan Muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah ialah *wa'ad, mubaligh mustamain* (juru penerang) yang menyeru mengajak dan memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam. [42]
c) M. Natsir, pembawa dakwah merupakan orang yang memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu memilih jalan yang membawa pada keuntungan.[43]

Pada dasarnya semua pribadi Muslim itu berperan secara otomatis sebagai mubaligh atau orang yang menyampaikan atau dalam bahasa komunikasi dikenal sebagai komunikator. Untuk itu dalam

[41] A. Hasyimi, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 162
[42] HMS. Lathief, dan Nasaruddin, *Teori dan Praktek Dakwah*, (Jakarta: Firma Dara, 1980), 20.
[43] M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, (Jakarta: Islamiah Indonesia, tth), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi dakwah yang berperan sebagai da'i atau mubaligh sebagai berikut: (1) secara umum adalah setiap Muslim atau Muslimat yang mukallaf (dewasa) di mana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah; "Sampaikan walaupun hanya satu ayat." (2) secara khusus adalah mereka yang mengambil spesialisasi khusus (*mutakhasis*) dalam bidang agama Islam yang dikenal panggilan dengan ulama.[44]

Dalam kegiatan dakwah peranan da'i sangatlah esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. "Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebarkan di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya.[45]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, da'i merupakan ujung tombak dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga peran dan fungsinya sangat penting dalam menuntun dan memberi penerangan kepada umat manusia.

2) Mad'u (penerima dakwah)

[44] Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Baru Pertama, 1997), 41-42

[45] Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam, Seni dan Teknik Dakwah*, (Bandung: CV Diponegoro, 1973), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur dakwah yang kedua adalah *mad'u*, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah QS. Saba' 28:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨

"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui" (QS. Saba" : 28)

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuanuntuk mengajak mereka mengikuti agama Islam; sedangkan kepadaorang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Mereka yang menerima dakwah ini lebih tepat disebut *mad'u* dakwah daripada sebutan objek dakwah, sebab sebutan yang kedua lebih mencerminkan kepasifan penerima dakwah; padahal sebenarnya dakwah adalah suatu tindakan menjadikan orang lain sebagai kawan berpikir tentang keimanan, syari'ah, dan akhlak kemudian untuk diupayakan dihayati dan diamalkan bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an mengenalkan kepada kita beberapa tipe *mad'u*. Secara umum *mad'u* terbagi tiga, yaitu: mukmin, kafir, dan munafik. Dan dari tiga klasifikasi besar ini *mad'u* masih bisa dibagi lagi dalam berbagai macam pengelompokan. Orang mukmin umpamanya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu: *dzalim linafsih, muqtashid*, dan *sabiqun bilkhairat*. Allah berfirman:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan[1260] dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar."(QS. Al-Fathir : 32)

Sedangkan kafir dibagi menjadi kafir *zimmi* dan kafir *harbi*, yaitu sesuai firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩

Artinya "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (8). Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (9)" (QS. Al-Mumtahanan : 8-9)

Dalam al-Qur'an selalu digambarkan bahwa setiap Rasul menyampaikan risalah, kaum yang dihadapinya akan terbagi dua: mendukung dakwah dan menolak. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan metode yang mendetail dalam berinteraksi dengan pendukung dan bagaimana menghadapi penentang. Tetapi, isyarat bagaimana corak *mad'u* sudah tergambar cukup signifikan dalam al-Qur'an.

Mad'u (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan *mad'u* tersebut antara lain sebagai berikut:[46]

a) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.

[46] Arifin, M., *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1977), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa.

c) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.

d) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, dan pegawai negeri

e) Dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin.

f) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.

g) Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-karya, narapidana, dan sebagainya.

3) *Maudu"*(Pesan Dakwah)

Membahas pesan dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan pesan dakwah Islam. Akan tetapi, ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: Aqidah, Syariah, Muamalah dan Akhlak.[47]

a) Aqidah; Masalah pokok yang menjadi pesan dakwah adalah akidah Islamiah. Karena akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Dari akidah inilah yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam

[47] Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah Islam adalah akidah atau keimanan. Dengan iman yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai setiap langkah dakwah.[48]

b) Syariah; Syariat Allah yang ditujukan untuk umat manusia itu pada dasarnya satu, dan risalah yang ditujukan untuk para nabi bersifat kekal dan abadi. Pangkalnya dimulai sejak Nabi Adam sedangkan cabangcabangnya berakhir sampai manusia terakhir, yaitu hingga terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad sebagai *Khatam al-Ambiya wa al- Mursalin* (penutup para nabi dan rasul), sesungguhnya risalahnya tetap terkait hingga sekarang ini dan sampai hari kiamat. Dan karenanya Allah telah memberi syariat kepada manusia berupa agama itu yang esensinya satu, yaitu "Islam" dan tidak akan berubah dengan bergantinya nabi, serta tidak akan berubah dengan berubahnya masa. Prinsip dasar utamanya adalah menebarkan nilai keadilan di antara manusia, membuat sistem hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial, mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati.[49]

c) Masalah Muamalah; Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan

---

[48] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah, (*Bandung : Mizan, 1992), 32.

[49] Muhammad Alwi Maliki,. *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas*, (Jogyakarta: eLSQ Press, 2003), 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah Swt. Dan muamalah jauh lebih luas daripada ibadah.

d) Masalah Akhlak; Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam memiliki cakupan luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi Muhammad saw bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur, mencakup akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar.

4) *Wasilah* (media) dakwah;

Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Sedangkan menurut Enjang dan Aliyuddin (2009) media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang dapat menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya sangat urgent dalam menentukan perjalanan dakwah.[50]

Pada prakteknya terdapat berbagai macam media dakwah yang bisa digunakan, mulai dari yang sifatnya tradisional seperti pengeras suara, mimbar, masjid, lembaga, pranata sosial, LSM dan lainnya hingga yang modern seperti koran, majalan radio, film, televisi, hingga jaringan internet.

5) Metode Dakwah

Metode artinya adalah suatu cara yang bisa ditempuh, sedangkan metode dakwah adalah suatu cara, jalan termasuk strategi, teknik, dan pola yang ditempuh oleh seorang da"i dalam melaksanakan dakwah guna tercapainya tujuan dakwah. Metode dakwah pada dasarnya berpijak pada dua aktivitas bahasa lisan/tulisan dan aktivitas badan atau perbuatan.[51]

Dalam Aquran metode dakwah secara umum sebenarnya telah dijelaskan dalam salah satu ayat yang artinya adalah:

> *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl : 125*

Berpijak dari ayat tersebut, menurut Enjang dan Aliyudin mengatakan bahwa metode dakwah berpegang pada tiga prinsip utama

[50] Enjang dan Aliyuddin, *opcit*, 93
[51] Enjang dan Aliyuddin, *opcit*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu meliptui dakwah *bil hikmah*, dakwah *bil mauidhah hasanah,* dan dakwah *bil mujadalah,* dimana ketiga hal tersebut bisa berkembang dalam metode ceramah, keteladanan, pendidikan, diskusi, pemberdayaan dan lain sebagainya.[52]

6) Tujuan Dakwah

Sedangkan unsur-unsur dakwah yang terakhir adalah tujuan, artinya setiap dakwah harus memiliki tujuan atau oreintasi yang ingin di capai. Tujuan ini dimaksudkan sebagai pemberi arah atau pedoman bagi gerak dan langkah kegiatan dakwah. Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah.

Menurut M. Natsir dakwah itu memiliki tiga tujuan utama yaitu, pertama memanggil kita kepada syariat, memecahkan persoalan hidup masyarakat baik dalam keluarga, kelompok, berbangsa dan bernegara. Kedua, tujuan dari dakwah itu adalah memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba allah di atas dunia yang terbentang luas. Sedangkan yang ketiga adalah memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah.[53]

d. Metode Dakwah

1) Dakwah *Bil Hikmah*

---

[52] Enjang dan Aliyuddin, *opcit.* 87

[53] Thoir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya,* cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah *Bil Hikmah* sebenarnya merupakan metode dakwah yang kompleks. Dalam bahasa Arab, kata ”Hikmah” sebenarnya memiliki banyak arti, di samping kebijaksanaan, ia juga memili arti pandai, adil, lemah lembut, kenabian, sesuatu yang mencegah kejahilan dan kerusakan, keilmuan, dan pemaaf. Namun perkataan hikmah serikali di terjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan hikmah seringkali membuat pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan kepadanya tanpa paksaan ataupun ketakutan.[54]

Dakwah dengan metode ini kalau mengacu dalam teori komunikasi memang kerap kali di sebut sebagai *frame of reference, fiel of reference* dan *field of experience*, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan (objek dakwah). Dengan kata lain, ia merupakan suatu model komunikasi dengan pendekatan yang dilakukan secara persuasif.[55]

Ibnu Qayyim dalam bukunya *At-Tafsirul Qayyim* berpendapat bahwa pengertian hikmah yang paling tepat adalah yang seperti dilakukan oleh para mujahid dan malik malik yang mendefinisikan hikmat sebagai pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya, ketepatan dalam perkataan dan kebenarannya. Hal ini tidak dapat di

[54] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 321
[55] Tato Tasmara, *Opcit*. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

capai kecuali dengan memahami Al-Qur"an dan mendalami syariat Islam serta hakikat iman.[56]

Kalau melihat penjelasan di atas, dakwah bil hikmah sebenarnya merupakan dakwah dengan memberikan contoh yang baik atau ketelandanan. Dengan keteladanan seorang da"i itulah nantinya masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya akan terinspirasi untuk mengikuti prilakunya, dengan didasarkan pada kesadarannya sendiri, tanpa paksaan oleh orang lain, ataupun tanpa tekanan dan ketakutan.

2) Dakwah *Bil Mau"idzah Hasanah*

Kalau ditinjau dari sisi bahasa *mau"izhah hasanah* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *mau'izhah* dan *hasanah.* Kata *mau'izhah* berasal dari kata *wa'azha-ya'izhu-wa'izhatan* yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan.[57]

Asep Muhidin mengutip pengertian yang diberikan oleh para mufassir, seperti Al-Maragi, Muhammad Nawawi dengan tafsirnya at-Tafsir Al-Munir , mendeskripsikan pengertian *Al-mauizhah al-hasanah* sebagai pelajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari hal perbuatan jelek melalui *tarhib* dan *targhib* (dorongan dan motivasi); penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, petutur, teladan, pengarahan dan pencegahan dengan cara halus, dengan tutur kata yang

[56] Munzir Suparta, *Metode Dakwah*, Cet Ke-1 (Jakarta : Putra Grafik, 2003), 10
[57] Lois Ma"luf, *Munjid al-Lughah wa A'lam* (Beirut : Dar Fikr, 1986), 907

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah lembut, pelan-pelan, bertahap, dan sikap kasih sayang dalam konteks dakwah, dapat membuat seseorang merasa dihargai rasa kemanusiaannya sehingga dapat merespon positif dari mad'u.[58]

Ali Musthafa Yakub memiliki pengertian yang berbeda, ia mengartikan *mauizah al-hasanah* dengan ucapan yang berisi nasihat-nasihat baik dan bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya, atau argument-argumen yang memuaskan sehingga pihak audiens dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah.[59] Sedangkan Abd. Hamid al-Bilali mengartikannya dengan suatu *manhaj* (metode) dalam dalam berdakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.[60]

3) Dakwah *Bil Mujadalah*

Kata Mujadalah berasal dari kata *Jadal* atau *Jidal*, kedua kata tersebut menunjuk pada pengertian perdebatan, yaitu; diskusi dengan cara saling menyalahkan pendapat lain dan membenarkan pendapat sendiri.[61] Dalam konteks tersebut Dimana kedua pihak saling

---

[58] Asep Muhidin, *Dakwah dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 165-166

[59] Ali Mustafa Yakub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi,* (Jakarata : Pustaka Firdaus, 1997), 21

[60] Abd. Hamid*, al-da'wah fi ingkar al-muankar*,(Kuwat: Dar al-Dakwa,1989). 260 atau baca Munzier Saputra dan Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, edisi Revisi, (Jakarta: Rahmad Semesta,2006), 16

[61] Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an,* terj. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan pendapat masing-masing. Secara terminologi, *jadal* adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit.[62]

Sedangkan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan, *jadil/jidaal* maksudnya perdebatan dengan debat terbaik, seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan menyeru manusia kepada hujjah.[63] Hujjah di sini maksudnya adalah berdebat dengan mengeluarkan pendapat yang kebenarannya dapat dipahami oleh akal dan diyakini oleh hati.

Sedangkan dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, menjelaskan kata *jâdilhum* terambil dari kata *jidâl* yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya mitra bicara. Selanjutnya, *jadil* juga adalah perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Sedangkan perintah ber-*jadil* disifati dengan kata *ahsan*

---

[62] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. Edisi ketiga. 2009), 121

[63] Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalâlain,*(Surabaya: Maktabah Dâr Ihya" al-Kutub al-,,Arabiyyah Indonesia, 1414H), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*(*yang terbaik), bukan sekedar yang baik. Dalam perspektif Quraish Shihab, *jadil* terdiri dari tiga macam yaitu: Yang buruk adalah yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan, serta yang menggunakan dalil-dalil yang tidak benar. Yang baik adalah yang disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya yang diakui oleh lawan, dan yang terakhir adalah Yang terbaik adalah yang disampaikan dengan baik, dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.[64]

Tetapi pada prinsipnya *dakwah bil mujadalah*, bertukar pikiran dengan cara yang terbaik dalam upaya menguak tentang kebenaran yang dapat diambil nilai kebenarannya secara utuh, terutama hal ini yang berhubungan dengan nilai Islam, juga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari di bermasyarakat.[65]

Mujadalah merupakan cara terkahir yang digunakan untuk berdakwah dengan orang-orang yang memiliki daya intelektualitas dan cara berpikir yang maju. Seperti digunakan untuk berdakwah dengan ahli kitab. Oleh karena itu Al-Qur"an juga memberi perhatian khusus tentang berdakwah dengan ahli kitab karena mereka memang telah dibekali pemahaman keagamaan dari utusan terdahulu. Al-Qur"an juga

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* volume 6, ,Cet ke-2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 776-777.

[65] Abdurahman Arroisi, *Laju Zaman Menentang Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang berdebat dengan mereka kecuali dengan jalan yang baik.

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat denganAhli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka[1154], dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri. (QS. Al-Ankabut : 46).

3. Urgensitas Politik dalam Dakwah

Menurut Aristoteles (384-322 SM) politik adalah usaha untuk mewujudkan negara yang sempurna, dengan tujuan memanusiakan manusia. Melalui hidup bernegara manusia akan mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan bermartabat. Manusia dapat mencapai kebajikan yang tinggi melalui moralitas yang terpuji dan itulah yang membedakan manusia dengan mahluk Tuhan lainnya. Aristoteles juga memandang bahwa negara dibangun untuk kebaikan tertinggi *(the highets good,* dan bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok dan bukan pula untuk negara itu sendiri, melainkan untuk keseluruhan warga. Dengan demikian, negara dianggap sebagai alat untuk dapat mengupayakan dan menjamin kesejahteraan bersama.[66]

[66] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara lebih luas, Miriam Budiarjo memandang politik sebagai sebuah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima sebahagian besar masyarakat untuk suatu tujuan kehidupan yang baik dan harmonis. Untuk menacapainya, maka diperlukan suatu kebijakan umum *(public policy)* yang menyangkut peraturan dan alokasi *(allocation)* atau distribusi dari sumber daya alam, serta adanya kekuatan *(power)* serta wewenang *(authority)* dalam mengatur urusan bersama tersebut dan untuk menyelesaikan konflik yang akan timbul. Tujuan dari proses politik bukan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi-pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.[67]

Unsur dari kekuasan politik sitidaknya meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, negara (*state*), yaitu suatu organisasi dalam sebuah wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Di dalamnya memiliki kekuatan mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyatnya. Oleh sebab itu maka negara dianggap sebagai inti dari politik. *Kedua,* kekuasaan (*power*) adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Politik dalam hal ini berbicara seputar hal-hal yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan yang biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*).

Ketiga, pengambilan keputusan *(decision making).* Pengambilan

[67] Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif yang mengikat seluruh masyarakat dan sebagai sebuah nilai yang harus dipatuhi, dan juga sebagai arah bagi negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap warga negaranya.

Keempat, kebijakan umum *(public policy).* Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif. Kehidupan politik menurut pendirian yang lazim, meliputi semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan ini. Politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, terorganisasi dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau merubah susunan kemasyarakatan ke arah lebih baik. *Kelima,* pembagian *(distribution)* atau alokasi *(allocation).*

Dalam kaitan ini Harold D. Laswell mengartikan politik dengan siapa, memperoleh apa, kapan dan bilamana. Hal tersebut dimaksudkan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat, apabila nilai atau aturan tidak merata atau tidak adil maka itulah yang kemudian menimbulkan konflik.

Politik dalam konsep ideal berarti berusaha untuk mewujudkan kebaikan di dalam masyarakat, yang dipahami sebagai pengaturan urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat atau umat, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri.[68]

Ramlan Surbakti memberikan sebuah pandangan dan kesimpulan mengenai politik. *Pertama,* politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua,* politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga,* politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat,* politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima,* politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[69]

a) Konsep-Konsep Pokok Politik

1) Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.[70] Sedangkan menurut Socrates bahwa negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis (negara waktu itu). Menurut jean Jacques rousseau negara adalah perserikatan dari rakyat yang secara bersama-sama melindungi dan mempertahankan hak masing-masing begitu juga harta benda anggota

[68] Sudjana, *Islam Fungsional,* (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 183.
[69] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta, PT. Gramedia, 1992), 1-2.
[70] Budiardjo, *Op.cit*. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan tetap hidup secara bebas dan merdeka[71]

Dengan demikian menurut penulis, negara adalah organisasi persekutuan yang memiliki wilayah, diakui oleh negara lain dan memiliki sistem politik yang melembaga yang bertugas untuk mensejahterakan warga negaranya.

2) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.[72]

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. [73]

Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Misalnya seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kekuasaan dapat juga bersumber dari kepercayaan atau agama. Di banyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan penuh terhadap santrinya dan juga masyarakatnya. Sehingga mereka dianggab sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan

[71] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010), 74-77.
[72] Inu Kencana Syafiie, *Opcit.* 13
[73] Budiardjo, *Op,cit*. 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya dalam proses pembuatan keputusan di tempat tersebut.

Selanjutnya kita perlu membedakan antara dua istilah yang menyankut konsep, yaitu *scope of power* dan *domain of power.*[74] *Scope of power* (cakupan kekuasaan) merujuk pada kegiatan, perilaku serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi obyek kekuasaan. Misalnya. Seorang direktur Pengusahaan mempunyai kekuasaan untuk memecat karyawan (sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku), akan tetapi, tidak mempunyai kekuasaan terhadap karyawan di luar hubungan kerja tersebut.

3) Pengambilan keputusan (*Decision Making*)

Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.[75] Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yan di ambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.

Setiap proses membentuk kebijakan umum atau biasa disebut kebijakan pemerintah adalah hasil dari pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan dalam memprioritaskan kebijakan dalam

[74] Budiardjo, *Op,cit*. 62-63.
[75] Budiardjo, *Op,cit*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaikkan harga BBM dan mengalihkan terhadap pengembangan kesehatan, maka hal ini adalah hasil dari keputusan yang telah di pelajari beberapa alternative lain seperti memprioritaskan pertanian ataupun perindustrian.

4) Kebijakan (*policy, beleid*)

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.[76]

Dalam pengambilan kebijakan yang harus di utamakan adalah kebijakan umum (*public policy, beleid*), menganggab bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama,cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu disusun rencana-rencana yang mengikat keseluruhan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan (*policy*) oleh pihak yang mempunyai wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

5) Pembagian (distribution) atau alokasi

Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa

[76] Budiardjo, *Op,cit*., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik tidak lain dan tidak bukan adalah pembagian dan mengalokasikan nnilai-nilai secara mengikat.[77]

Yang ingin di tekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian dan alokasi sering kali tidak merata dank arena itu menyebabkan banyak persoalan dan konflik. Yang harus dipahami adalah masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dan diperhatikan dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijkan pemerintah dalam memutuskan beberapa alternative tersebut.

Oleh karena itu, nilai (*values*) sangat baik dan benar dan keduanya sangat diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga oleh karenanya dianggab baik dan benar. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgment*) atau suatu asas misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat. Dan juga nilai bisa bersifat konkret (material) kekayaan, rumah dan sebagainya.

b) Jenis-Jenis Politik Dalam Islam

Mengacu pada definisi tentang politik diatas, dapat dipahami bahwa politik bagi umat muslim merupakan sebuah tindakan yang harus diambil dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat sesuai dengan ajaran inti Islam sebagai agama *„rahmatan lil alamien".* Karena itu, dalam tinjauan Islam politik dibagi ke dalam dua jenis yaitu politik berkualitas tinggi *(high politic)* dan politic kualitas rendahan *(low politic).*

[77] Budiardjo, *Op,cit*. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Politik Kualitas Tinggi *(High Politic)*

Ada tiga ciri pokok yang harus dimiliki oleh politik kualitas tinggi atau setidak-tidaknya upaya yang harus dilakukan agar politik kualitas tinggi ini bisa terjadi yaitu:[78]

Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara keteraturan social yang egalitarian. Kekuasaan juga harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh masyarakat. Seseorang yang didik di lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, atau orang yang memiliki pengaruh atau power tertentu dalam suatu organisasi tidak boleh memisahkan antara kekuasaan dengan amanah yang telah diberikan.[79]

Kedua, setiap jabatan politik mengandandung dalam dirinya „*mas'uliyyah"* pertanggungjawaban *(accountability).* Sebagaimana dijarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tanggungjawab yang dimaksud di sini bukan hanya tanggungjawab kepada institusi/lembaga dan masyarakat yang

[78] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*
[79] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimpinpinya, tapi juga tanggungjawab dihadapa Allah. Seoarang politikus yang memiliki kesadaran akan tanggungjawab semacam ini niscaya akan mampu mengontrol dirinya sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan kekuasaan yang yang dimilikinya.[80]

Ketiga, politik dengan seluruh aspeknya harus dikaitkan dengan prinsip *ukhuwwah*, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia. Persaudaraan ini sudah melampaui batas-batas etnis, ras, agama, keturuan, latarbelakang sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian konsekwensi logis dari praktek politik semacam ini akan senantiasa menjaga agar tidak terjadi gaya politik konfrontatif yang dengan konflik yang berkepanjangan. Namun sebaliknya gaya berpolitik yang dipakai adalah sebagai dasar dari mempererat hubungan persaudaraan yang dibangun diatas nilai kerjasama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik. [81]

Melihat ketiga ciri di atas Syamsul Bachri Day (2005) mengatakan bahwa hal ini selaras dengan salah salah satu ayat yang alquran yang menyatakan bahwa "*Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakkah shalat dan membayar zakat dan menuruh (manusia berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan; dan bagi Allah sajalah*

[80] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*
[81] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalinya segala macam urusan." (QS. Al-Hajj : 41). Politik jenis inilah yang dianggap sebagai jalur politik yang sangat mendukung proses dakwah dalam Islam.[82]

2) Politik Kualitas Rendahan *(Low Politic)*

Politik Kualitas Rendahan *(low politic)* ini diidentikkan dengan isltilah politik Machiavellis yang dinilai sebagai politik yang berorientasi pada pencapaian kekuasaan dan cara mempertahankannya dengan cara apapun. Machiavellis sendiri merupakan salah satu tokoh controversial yang menuangkan pokok pemikiran politiknya dalam karyanya yang berjudul *The Prince*—yang jika dilihat dari kacamata dakwah—bersifat desktruktif atau kontra produktif. Sehingga politik aliran Machiavellian ini digolongkan sebagai low politik yang memiliki cirri sebagai berikut:[83]

Pertama, Machiavelli mengajarkan bahwa kekerasan (*violance)* yang brutal dan kekejaman merupakan cara yang sering kali perlu diambil oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan pencapaian tujuan. Hal inilah yang kemudian membuat terkenal sebuah semboyan yang mengatakan bahwa "tujuan menghalalkan segala cara" sehingga tak peduli dengan cara apapun selama tujuan itu bias dicapai maka diperbolehkan. Jelas hal ini bertentangan dengan

[82] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*
[83] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam yang mengajarkan bahwa tujuan yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik pula.[84]

Kedua, Penaklukan secara total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebijakan puncak *(summon bonum)*. Dalam konteks ini musuh tidak diperkenankan diberikan kesempatan untuk bangki, namun mereka harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya. Melihat hal tersebut dalam *low politic* ini kekuasaan dan pencapaian tujuan menjadi inti dari paradigma prilaku politik mereka. Karena itulah bagi penguasa wajib hukumnya menurut Machiavelli untuk melakukan operasi dan supresi atau penindasan dan penekanan.[85]

Ketiga, sebagai konsekwensi dari cirri yang di atas, dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus mampu berperan seperti binatang buas yang dengan kecerdikan dan kekuatannya mampu menakutkan menggertak dan membuat manusia takut. Sehingga bagi Machiavellei penguasa yang baik bukanlah penguasa yang dicintai oleh rakyatnya tapi penguasa yang ditakuti oleh rakyatnya.[86]

[84] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*
[85] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*
[86] Syamsul Bachri Day, *Opcit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ANGGOTA DPRD JAWA TIMUR DAN

AKTIVITAS DAKWAH POLITIK DI DPRD JATIM

A. Peta Geografis dan Demografis Propinsi Jawa Timur

Jawa Timur terletak antara 111,0′ BT hingga 114,4′ BT dan Garis Lintang 7,12" LS dan 8,48 „LS dengan luas wilayah 47.799,75 Km2. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Propinsi yang berada di ujung timur pulau jawa ini, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung).[1]

Masyarakat yang mendiami Propinsi Jawa Timur terdiri dari dari suku Jawa, Madura, Tengger, Osing, dan etnis Tionghoa. Dengan jumlah penduduk 39.107.095 jiwa yang mayoritas adalah menganut agama Islam, sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sebagian Suku Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Namun Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh utamanya pada Suku Madura

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/JawaTimur 20 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Suku Osing. Sedangkan mayoritas Suku Tengger menganut agama Hindu. Menurut catatan Kementerian dalam negeri, penduduk jawa timur yang menganut agama Islam sekitar 96,3%, sedangkan sisanya beragama Kristen Protestan 1,6 %, Katholik di anut oleh sekitar 1 % penduduk, sedangkan penganut Budha hanya 0,4 %, dan Hindu 0,6 %.[2]

Sistem pemerintahan Propinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan propinsi lainnya yang ada di Indonesia. Propinsi tersebut dipimpin oleh gubernur, yang dibantu oleh seorang wakil gubernur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 22 Dinas Daerah, 16 Badan, 3 Kantor, serta 5 Badan Rumah Sakit. Sementara dalam koordinasi wilayah, dibentuk 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil): Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, dan Bakorwil IV Pamekasan.

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab.

[2] http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/35/jawa-timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.[3]

B. DPRD Jawa Timur dan Perannya Dalam Dakwah Politik

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.[4]

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi:

a. Legislasi; diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Gubernur.
b. Anggaran; diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Gubernur.

[3] http://www.jatimprov.go.id/site/tentang-jawa-timur/ 20 September 2015.
[4] http://www.jatimprov.go.id/site/tentang-jawa-timur/ 20 September 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengawasan; diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan APBD, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan DPRD Jatim mempunyai tugas dan wewenang yang juga diatur dalam peraturan yang sama, hal tersebut bisa dilihat dalam Bagian ke dua Pasal 3 dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Disana disebutkan bahwa DPRD Jatim memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk Perda bersama Gubernur;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Gubernur dan atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
e. Memilih wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Gubernur;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Anggota DPRD Jawa Timur berjumlah 100 (seratus) orang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum Provinsi yang disampaikan melalui Gubernur.

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) Tahun anggota DPRD yang lama.

Disamping itu, Anggota DPRD Jatim juga memiliki hak-hak tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Hak-hak tersebut meliputi interpelasi (hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara), hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD terbagi dalam lima komisi dengan satuan kerja yang berbeda-beda. Meliputi Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, serta Komisi E bidang kesejahteraan rakyat.

Selain terbagi dalam komisi-komisi, Anggota DPRD pada umumnya juga terbagi ke dalam fraksi-fraksi menurut partai politik yang menjadi kendaraan politik anggota yang bersangkutan dalam masa pencalonan. Fraksi-fraksi tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh anggota-anggota dari partai yang sama. Di lingkungan DRPD Jatim, terdapat 8 fraksi, yaitu fraksi PKB yang terdiri dari 20 kursi, PDIP 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, dan PPP 5 kursi. Adapun anggota dari dua parpol lainnya, yaitu NasDem dan Hanura (masing-masing 4 dan 2 kursi), tidak dapat membentuk fraksi karena tidak memenuhi prasyarat minimum 5 kursi untuk membentuk sebuah fraksi.

C. Peta Dakwah Propinsi Jawa Timur

Sebagaimana telah di singgung di atas, bahwa 96,3% penduduk yang berada di Jawa Timur adalah penganut Agama Islam. Nuansa kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama masyarakatnya juga cukup kental, utamanya yang berada didaerah kawasan pedesaaan karena itulah secara kebudayaan masyarakat jawa timur menempatkan golongan orang-orang yang memiliki ilmu keagamaan dalam stratifikasi masyarakat yang cukup tinggi seperti halnya golongan ulama, kyai, ustad, dan seterusnya.

Kalau melihat lintasan sejarah, Islam di Jawa berkembang melalui wilayah pesisir dan terus berkelanjutan ke wilayah pedalaman.[5] Proses Islamisasi secara struktural setidaknya telah dibentuk oleh beberapa unsur yang saling menunjang, yaitu: para pedagang yang menumbuhkan kantong-kantong Islam di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir; kesultanan Islam dengan tradisi maritim yang kuat di sepanjang pantai Jawa yang secara bertahap mampu melepaskan diri dari kerajaan Hindu di pedalaman; kelompok umat Islam, baik asing maupun pribumi yang mengisi beberapa pos birokrasi serta memimpin upacara keagamaan di kesultanan; dan para sufi atau para dai yang melakukan perjalanan berkeliling pedalaman untuk berdakwah, atau pun mendirikan pondok pesantren baru di pedalaman.[6] Mereka berdakwah dengan cara yang bijaksana melalui berbagai metode dan pendekatan yang persuasif, sehingga berhasil merubah lingkungan masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai tatanan kehidupan yang layak menjadi sebuah komunitas yang beradab, baik di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

---

[5] Nur Syam, *Islam Pesisir,* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 5

[6] Lihat Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa (Yogyakarta: LKiS, 1999), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak saat itulah proses perkembangan dakwah terus mengalami kemajuan, baik dari sisi pendekatan, metode, media dan materi-materi dakwah yang di sampaikan oleh para Da"i/Kyai, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren ataupun terjun langsung bersama masyarakat. Peran sentral Kyai dan pesantren memberikan corak dan warna tersendiri terhadap proses perkembangan dakwah Islam di jawa, khususnya di jawa timur. Sebagai tokoh yang memiliki posisi strategis di masyarakat, Kiai merupakan agen perubahan dalam masyarakat. Setiap gagasan yang disampaikan selalu direspons positif dan relatif akan ditaati masyarakat, sebab, kiai di mata masyarakat dipandang sebagai sosok yang memiliki integritas; ada relevansi dan konsistensi antara nilai-nilai Islam yang mereka sampaikan dengan sikap dan perilaku kesehariannya. Sampai batas-batas tertentu, kiai dianggap sebagian masyarakat sebagai representasi atau mendekati nilai-nilai Islam yang universal dan holistik.[7]

Proses penyebaran dan pengembangan serta penguatan ajaran-ajaran Islam dijawa timur memang tidak bisa lepas dari peran pondok pesantren, hal ini juga bisa dilihat dari bahwa hampir disetiap kabupaten dan kota yang ada jawa timur memiliki pondok pesantren yang berbasis pada pendidikan agama Islam *(diniyah)* yang kerap kali menjadi pilihan utama masyarakat untuk menempatkan putra-putrinya menggali ilmu agama. Walaupun tren ini terus tergerus oleh perkembangan zaman, pesantren tidak pernah kehilangan

[7] Lihat Abd. A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensinya ditengah-tengah masyarakat dan tetap menjadi rujukan masyarakat dalam hal keagamaan.

Data Jumlah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	**Pondok Pesantren**	**Madrasah Diniyah**
Pacitan	14	56
Ponorogo	64	202
Trenggalek	55	112
Tulungagung	90	197
Blitar	83	210
Kediri	114	157
Malang	231	186
Lumajang	106	109
Jember	214	203
Banyuwangi	131	95
Bondowoso	106	162
Situbondo	71	108
Probolinggo	150	250
Pasuruan	175	310
Sidoarjo	157	144
Mojokerto	148	178
Jombang	89	54
Nganjuk	77	168
Madiun	59	74
Magetan	40	93
Ngawi	54	40
Bojonegoro	100	254
Tuban	94	152
Lamongan	183	362
Gresik	124	234
Bangkalan	143	257
Sampang	131	176
Pamekasan	124	173
Sumenep	171	290
Kota Kediri	18	14
Kota Blitar	9	9
Kota Malang	36	24
Kota Probolinggo	16	12
Kota Pasuruan	13	25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Mojokerto	5	3
Kota Madiun	13	1
Kota Surabaya	62	30
Kota Batu	15	11
Jawa Timur	**3 485**	**5 135**

Sumber : Data Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur 2014

D. Peta Politik Jawa Timur

Kalau mengaca pada hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014, secara politik kawasan Jawa Timur masih menjadi dominasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baru kemudian di urutan nomor dua yang menempel secara ketat adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kedua partai tersebut yang memiliki dominasi cukup tinggi dalam meraih suara pada setiap ajang pemilihan anggota legeslatif dalam beberapa periode ini. Hal ini bisa dilihat dari tabel hasil perolehan kursi perwakilan yang duduk mejadi anggota DPDD Propinsi Jawa Timur.

Tabel Perolehan Kursi DPRD Jawa Timur Berdasarkan Partai

Partai	Kursi
PKB	20
PDI-P	19
Partai Gerindra	13
Partai Demokrat	13
Partai Golkar	11
PAN	7
PKS	6
PPP	5
Partai NasDem	4
Partai Hanura	2
Total	**100**

Sumber data : wikipedia.com

Dari data diatas dapat dipahami, bahwa secara politik, partai-partai yang berlatar belakang ideologi Islam masih mendominasi masyarakat di jawa Timur yang diwakili oleh Partai PKB yang memiliki basis massa dari orman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam NU. Namun walaupun demikian, distribusi kekuasaan dilingkungan Anggota DPRD sendiri dibagi rata berdasarkan tingkat jumlah kursi masing-masing partai. Untuk ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 terdiri dari Abdul Halim Iskandar (Ketua; PKB), sedangkan wakil ketua dijabat oleh Kusnadi yang menjadi perwakilan dari PDI-P, dan juga Tjutjuk Sunario dari fraksi partai Gerindra, Achmad Iskandar dari partai Demokrat, serta Soenarjo dari fraksi partai Golkar yang resmi menjabat sejak 2 Oktober 2014.

E. Profil Anggota DPRD Jawa Timur

1. Baddrut Tamam Anggota DPRD Fraksi PKB

Baddut Tamam merupakan salah satu tokoh politik muda yang lahir di Pamekasan 02 Desember 1976. Sejak kecil ia dibesarkan dilingkungan pondok pesantren di daerah Madura, bahkan ia pun penah menjadi santri di tanah jawa untuk memperdalam ilmu agamanya. Karena itulah secara keagamaan ia memiliki pemahaman ilmu agama yang cukup dalam.

Pada tahun 1989 Baddrut Tamam lulus Sekolah Dasar di Sumber Anyar Pamekasan lalu ia nyantri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pemakesan untuk menempuh pendikan Madrasa Tsanawaiyah, dan Madrasa Aliyah hingga pada tahun 1995.

Karena merasa belum cukup menimba ilmu agama, ia kembali nyantri pada KH. M. Zaim Syakir Ma"sum di Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang hingga tahun 1998. Lalu pada tahun yang sama ia melanjutkan studinya pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, dan lulus menjadi sarjana pada tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sejak ia menjadi mahasiswa, Baddrut memang aktif diberbagai banyak kegiatan organisasi baik intra ataupun ekstra kampus. Ia tercatat pernah menjadi Senaotr Fakultas Psikologi UMM tahun 1989-2000, dan bahkan ia pernah membidani lahirnya Lembaga Studi Psikologi dan Islam (LSPI Phenomenon) pada tahun 2000.

Tidak puas dengan aktivitas organisasinya di intra kampus, Baddrut Tamam juga banyak mempelopori kegiata-kegiatan ekstra kampus dimasanya, salah satunya, pada tahun 2001 ia juga turut andil dalam lahirnya Lembaga Studi islam dan Tranfsormasi Sosial (EISiTS), Ibn Araby Study Club Malang pada tahun 2002, dan aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari tingkatan Rayon hingga menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jawa Timur pada periode 2007-2008.

Disisi yang lain, Baddrut Tamam juga aktif dalam organisasi keagamaan, Baddrut aktif di Organasasi Islam Terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU), pada periode 2008-2013 ia sudah aktif menjadi anggota balitbang PWNU Jatim, serta Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur periode 2009-2014 dan periode 2014-2018.

Berkat pengalamannya dalam berbagai bidang organisasi Baddrut Tamam terus berupaya untuk menyumbangkan ide dan tenaganya demi bangsa Indonesia dan Umat Islam ke jenjang yang lebih besar dan strategis. Karena itulah ia mulai masuk dan aktif dalam partai politik. Namun ia memilih partai politik yang memiliki kultur yang sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

visi dan misinya selama ini yang dibesarkan dari tradisi pesantren dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai agama Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Hal itulah yang menjadi alasan utama Baddrut Tamam memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai medang gerak selanjutnya. Tak butuh lama bagi Baddrut untuk berkarir di PKB, hal ini ditunjukkan sejak ia masuk ke dalam Partai berlambang bumi tersebut, potensinya sudah mulai dilirik oleh banyak tokoh dan masyarakat sehingga ia pun semakin dekat dan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura.

Citra positif dan baik Baddrut Tamam di masyarakat itulah yang pada akhirnya mengantarkan tokoh muda ini terpilih sebagai Wakil Rakyat DPRD Jatim dari Fraksi PKB periode 2009-2014. Pada masa menjabat sebagai wakil rakyat tersebut, Baddrut menunjukkan dedikasinya sebagai tokoh muda yang kompenten dan amanah, ia senantiasa memperhatikan konstituennya melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang ia perjuangkan lewat parlemen.

Pada periode pertama jabatannya sebagai anggota DPRD Jatim, Baddrut Tamam berhasil menunjukkan pada masyarakat bahwa dirinya memang layak untuk mengemban amanat rakyat. Hal ini terbutkti dengan terpilihnya kembali Baddrut Tamam sebagai wakil rakyat sebagai anggota DPRD Jatim Komisi E Bidang Ekonomi pada periode 2014-2019, tidak hanya itu ia bahkan juga diamanatkan menjadi Ketua Fraksi PKB di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota komisi. Sementara di tubuh partai PKB sendiri ia menjabata sebat Wakil bendahara DPW PKB Jatim periode 2010-2015.

2. **Achmad Heri Anggota DPRD Frkasi Nasdem**

Tokoh selanjutnya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Achmad Heri, tokoh kelahiran Bangkalan pada 20 Mei 1968 (46 tahun) ini termasuk salah satu tokoh muda di Jawa Timur. Seperti halnya tokoh sebelumnya, Achmad Heri juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cukup ketat dalam hal agama. Hal ini bisa dilihat dari riwayat pendidikannya.

Sejak kecil Achmad Heri memang lahir dari lembaga pendidikan agama hal ini bisa dilihat bahwa sejak kecil ia sudah sekolah di Sekolah Dasar Islam (SDI) Baitul Ilmin Surabaya dan lulus pada tahun 1982, Kemudian ia melanjutkan pendidikan selanjutnya di salah satu lembaga pondok pesantren di Jombang, disana ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar Jombang hingga 1985, dan di tempat yang sama ia juga menempuh jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri dan lulus tahun 1988.

Namun Achmad Heri merasa belum cukup menempuh ilmu pengetahuannya, hingga ia melanjutkan studinya ke perguruan Tinggi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya (sekarang menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya). Di kampus yang dikenal dengan tradisi Islam yang cukup kuat tersebut, Achmad Heri mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, hingga ia mendapatkan gelar kesarjanaannya pada tahun 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak ia menjadi mahasiswa Achmad Heri juga aktif diberbagai macam pelatihan dan diklat seperti halnya pelatihan *Leader Training Through PTM For Community Developmen Worker* Nasional Tahun 1995, dan ditahun yang sama ia juga pernah ikut Penataran Kewaspadaan Nasional Pemuda Oleh Kantor MENPORA-LEMHANAS, dan mengikuti Lokakarya Strategic Planning Tingkat Nasional Oleh PP Lakpesdam Jakarta Tahun 2000.

Disamping itu, Achmad Heri juga aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan baik di intra kampus ataupun di ekstra kampus. Di intra kampus ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya Tahun 1992 dan tahun 1993, sedangkan di ekstra kampus banyak organisasi yang telah ia ikuti dan ikut berperan aktif di dalamnya yaitu meliputi:

a. Ketua PMII Rayon Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 1990
b. Ketua I PMII Komisariat IAIN Sunan Amel Surabaya Tahun 1991
c. Ketua Forum Silaturahim Remaja Masjid (FSRM) Surabaya Tahun 1992
d. Ketua Litbang Pengurus Cabang PMII Surabaya Tahun 1993
e. Wakil Ketua FSRM Jawa Timur Tahun 1994
f. Ketua I Pengurus Cabang PMII Surabaya Tahun 1994
g. Wakil Ketua Forum Remaja Masjid Jawa Timur Tahun 1995
h. Wakil Ketua LAKPESDAM NU Jawa Tmur Tahun 1998
i. Ketua Pimpinan Pusat IPNU Jakarta Tahun 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Tahun 2002

k. Wakil Ketua Ansor Jawa Timur Tahun 2007

l. Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Tahun 2008

m. Sekretaris Presidium Majelis Alumni IPNU Jati Tahun 2010 hingga Sekarang.

Berbagai macam aktivitas di berbagai organisasi itulah yang kemudian mengantarkan Achmad Heri untuk masuk ke ranah yang lebih besar dan dia pun memutuskan untuk bergabung dengan salah satu partai politik yang memiliki kultur yang dekat dengan kehidupannya selama ini, Partai Kebangkitan Bangsa menjadi pelabuhan pertama Achmad Heri untuk terus berjuang dan berdakwah melalui jalur politik. Karirnya pun begitu cepat dalam dunia politik, tercatat pada tahun 2005 Achmad Heri sudah mejabat sebagai Wakil Sekretaris Caretaker DPW PKB Jawa Timur, setahun kemudian ia pun diangkat menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.

Namun pada saat partai Nasdem lahir, Acmad Heri pun berpindah haluan, ia memilih bergabung dengan partai yang baru digagas oleh Surya Paloh tersebut pada tahun 2010, dan dipartai itulah Achmad heri kembali mendapatkan jabatan yang cukup penting yaitu menjadi Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur, dan bahkan hingga sekarang jabatan tersebut masih dipegangnya.

Karir politik Achmad Heri cukup gemilang, bahkan ia dinilai memiliki track record yang baik diberbagai aktivitas yang pernah ia geluti, sehingga tak heran jika pada pemilu legislatif pada tahun 2014 yang silam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim Achmad Heri Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun), dan duduk di Komisi D Bagian Pembangunan.

Achmad Heri menuturkan pilihannya untuk terjun ke dunia politik tidak hanya semata-mata dalam rangka kekuasaan semata, tapi ia melihat bahwa dunia politik adalah tempat yang tepat jika ingin berdakwah dan memberdayakan umat, baginya menjadi anggota parlemen merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

F. Realitas Dakwah dan Politik Dalam Pandangan Anggota DPRD Jatim

Para anggota DPRD Jawa Timur memiliki pandangan tersendiri tentang realitas dakwah dan politik yang selama ini terjadi. Selama ini dakwah hanya dipahami sebagai sebuah tabligh atau penyampaian ajaran-ajaran islam melalui mimbar-mimbar atau panggung-panggung keagamaan. Padahal dakwah seharusnya dipahami sebagai sebuah seruan akan kebaikan yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Seruan tersebut tidak hanya dilakukan dimasjid, di podium ataupun di mimbar saja, melainkan bisa dilakukan diberbagai tempat.

Hal tersebut juga amini oleh Baddrut Tamam, ia menuturkan bahwa diberbagai daerah fenomena dakwah memang sangat variatif, hal tersebut dapat dipahami karena dakwah cakupannya begitu luas. Namun menurutnya secara historis dakwah selalu mengalami dinamika dan perubahan-perubahan dari masa ke masa.

Pola perubahan dan perkembangan dakwah tersebut tidak hanya terjadi seca metode dan pendekatan saja, melainkan pesan-pesan yang disampaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mulai terus berkembang. Baddrut mengungkapkan bahwa pada awalnya dakwah hanya bersifat tekstual menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai teks-teks alquran dan hadist, namun hal tersebut terus mengalami perkembangan hingga ke pendekatan politik dan kekuasaan.

> "Saya melihat begini, dakwah itu ada beberapa model cara yang dalam setiap ruang atau dalam setiap generasi itu berbeda. Kalau di indonesia, seperti di Madura misalnya, dulu orang madura itu senang atau suka model pengajian di panggung dan mendatangkan kiai dan semuanya datang. Sedangkan yang disampaikan kiai bagaimana membela islam, bagaimana melakukan dan meniru akhlag nabi. kiai mentransformasikan bebarapa ajaran syariat yang ada di alqur"an dan hadist dan di tingkat-tingkat sunnah yang lain,"[8]

Lebih lanjut Baddrut juga menjelaskan bahwa pada era tahun 2000-an, fenomena dakwah yang diminati oleh masyarakat juga bergeser, masyarakat kerap kali mengundang para da"i baik dari kalangan ustad atau kyai yang bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang berbeda. Masyarakat kerap memiliki minat untuk mendengar dakwah yang disampaikan dengan berbagai cara-cara yang lucu dan tidak kaku.

> "Di tahun 2000an, ulama, ustad kiai diundang yang lucu atau yang mempunyai selera humor yang tinggi. pesan-pesan, ajarannya dan bimbngannya lebih ringan dan lebih santai baru kemudian melalui media guyonan-guyonan ala dakwah. Sampai sekarang begeser lagi porsi guyonnya yang lebih tinggi dakwahnya lebih kecil,"[9]

Karena itulah, menurut Baddrut Tamam, perkembangan dakwah selanjutnya harus bersifat tranformatif yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Artinya dakwah tidak hanya merupakan pesan-pesan saja melainkan juga berubah menjadi ajakan yang sifatnya praksis

---

[8] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[9] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga disamping umat giat beribadah mereka juga bisa berdaya dalam kehidupannya.

> "Maka kedepan, dakwah menurut saya ditahun-tahun yang datang yaitu dakwah peberdayaan dan transformastif. Misal pada dakwah pemberdayaan, kiai sudah harus lebih fokus pada pemberdayaan, tranformasi dan pengembangan anggota masyarakat yang dibina"[10]

Dalam konteks dakwah inilah peran anggota DPRD sangat diperlukan. Karena menurut Baddrut Tamam, dakwah pemberdayaan akan sangat efektif jika dilakukan dalam ranah politik. Sehingga dakwah politik bisa menjadi media dakwah yang strategis dalam rangka pembedayaan masyarakat.

> "Karena DPRD sebagai pengambil kebijakan di Propinsi Jatim punya wewenang untuk membuat kebijakan yang bisa memihak dan memberdayakan masyarakat, seperti halnya pemberdayaan akses modal, pembangunan serta pemerataan pembangunan dimasing-masing daerah. Siapa pun yang terlibat dalam pengambilan kebijakan politik di negeri ini, baik di propinsi ataupun di pusat, itu bisa menjadi sarana perjuangan dakwah agar mendapatkan ridho dari Allah."[11]

Hal senada juga diungkapkan oleh Achmad Heri, namun ia juga menambahkan bahwa pada era saat ini, masyarakat umum lebih membutuhkan dakwah yang bersifat riil, bukan hanya sekedar dakwah tekstualis yang menyampaikan ayat-ayat Alquran atau pun hadits, namun masyarakat juga perlu dakwah yang lebih konkrit seperti halnya mengajak mereka memberdayakan ekonomi, menjadi pengusaha, petani yang produktif, dan lain sebagainya.

> "Masyarakat itu sekarang membutuhkan dakwah dalam bentuk riil, seperti keberpihakan dan pembelaan kepada orang-orang terdzalimi,

---

[10] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[11] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah, faqir, dan miskin. Karena itulah sebagai anggota DPRD kita dakwahnya sudah tidak lagi dengan *kaulan* (perkataan) tapi dengan kekuatan kita melakukan proses pendampingan kepada mereka."[12]

Achmad Heri juga menegaskan bahwa dakwah yang bersifat pemberdayaan masyarakat adalah merupakan jawaban dari berbagai macam persoalan umat yang terjadi saat ini. Ia melihat tanpa adanya pemberdayaan maka masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh Islam akan sulit tercapai. Karena itulah peran dakwah politik adalah hal yang urgen yang harus disadari oleh para politisi yang muslim.

"Seyogyanya bagi seorang yang bisa dikatakan kaum santri itu juga harus bisa berdakwah dalam dinamika politik. Dia bisa melakukan amal makruf nahi mungkar sesuai dengan ajaran agamanya."[13]

Namun walaupun demikian, Achmad Heri menambahkan dalam dakwah politik seorang politisi juga berperan sebagai juru dakwah (da"i) karena itulah, ia menekankan bahwa politisii juga harus memiliki akhlak yang baik yang bisa menjadi teladan bagi politisi lainnya dan masyarakat pada umumnya.

"Jadi politisi itu juga harus memiliki sikap dan menerapkan akhlakul karimah baik secara *kaulan wa fi'lan wa fikron,* baik dalam percaturan politik dalam parlemen ataupun non-parlemen. Contonyah jika dalam parlemen tatkala dia melakukan komunikasi politik kebijakan dia mestik melakukan politik yang santun.[14]

G. Penyajian Data Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim

1. Dakwah Politik Dalam Perspektif Anggota DPRD Jatim

a. Politik sebagai Dakwah Pemberdayaan Umat

---

[12] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[13] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[14] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang politisi yang dibesarkan di lingkungan pondok pesantren yang notabene memiliki tradisi keislaman yang cukup kuat, Baddrut Tamam mempunyai misi besar ketika memutuskan untuk memasuki dunia politik. Baginya politik merupakan sarana yang cukup penting bagi strategi dakwah dalam upaya memperdayakan umat.

Bagi Badrut Tamam, secara definitif dakwah memiliki makna yang cukup luas. Menurutnya Dakwah itu berarti mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Hal ini menurutnya berbeda dengan realitas dakwah yang selama ini ada, ia menilai kebanyakan para juru dakwah kerap kali menyuruh kepada kebaikan, bukan mengajak. Padahal mengajak dan menyuruh itu adalah dua hal yang berbeda.

> "Dakwah itu secara umum maknanya sama, secara etimologi maknanya mengajak, baru secara lebih luas dakwah itu mengajak kepada kebaikan, sifat dakwah yang mengajak itu berbeda dengan menyuruh. jadi dakwah itu mengajak dengan cara yang baik dalam konteks ini dakwah itu perlu dipahami sebagai cara orang mengajak kepada kebaikan itu yang pertama."[15]

Setiap da"i memiliki media masing-masing untuk mengajak pada kebaikan tersebut. Bisa melalui musik, sholawatan, yasinan, tahilalan, wirausaha dan lain sebagainya. Namun sebagai politisi yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur, memiliki cara sendiri yang berbeda dengan para da"i pada umumnya.

Baddrut Tamam juga menuturkan bahwa yang perlu dipahami adalah politik merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu.

[15] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Dakwah itu memiliki tujuan dan pada point inilah untuk mencapai tujuan dakwah itulah politik bisa digunakan.

> "Jadi memaknai politik saya kira jangan hanya partai politik. politik itu adalah cara untuk kemdian mencapai tujuan tertentu"[16]

Secara epistimologis Baddrut Tamam memiliki landasan yang berbeda ketika memahami politik. Baginya Politik bukan hanya untuk kekuasaan yang menekankan intimidasi dalam etika politiknya. Namun sebagai masyarakat santri ia menegaskan bahwa politik harus dilakukan secara tranformatif, artinya adalah bahwa politik merupakan media untuk mentransformasikan nilai-nilai kebenaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

> "Saya secara epistemologinya berbeda sudut pandang, kalau landasan epistimologinya politik adalah hanya untuk kekuasan ya mesti menekan dan mengintimisasi dalam etik politik tertentu itu dibolehkan. Tetapi sebagai bagian dari msyarakat santri cara politiknya mesti transformsatif, menjadikan sebagai sarana yang kemudian mentransformatikan nilai kebenaran, nilai keislaman yang rahmatan lilalamin,"[17]

Pada point penting itulah menurut Baddrut Tamam dakwah politik menemukan perannya yang signifikan. Dia menjelaskan bahwa dakwah dalam politik itu bukan hanya mengajak yang bagus, bersahaja, dan tidak korupsi semata, namun juga harus meletakkan masyarakat sebagai element yang berpartisaspi langsung dalam hal pengambilan kebijakan.

---

[16] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[17] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badrut Tamam menuturkan bahwa dalam konteks ini, dakwah yang dilakukan terutama di pemerintahan melalui anggota DPRD—sebagai wakil rakyat dalam parlemen—itu ada tiga. Yaitu: Pertama. Berdakwah dengan melakukan cara politik yang sehat yang mengarah kepada sifat-sifat kenegarawanan. Dalam hal ini, Dia menjelaskan bahwa negarawan berbeda dengan politisi. Baginya politisi ansih itu adalah orang yang gaya berfikirnya hanya pada bagaimana pemilu yang akan datang bisa menang, sedangkan negarawan itu berfikir bagaimana generasi yang akan datang.

Kedua, stretegi atau langkah dakwah yang harus diambil oleh orang-orang yang duduk di DPRD juga mestinya juga mempertimbangkan generasi yang akan datang kemaslahatan, kebersamaan, kebersatuan umat itu juga menjadi pertimbangan politik dalam setiap kebijakan atau keputusan yang mereka buat.

Ketiga, dakwah politik, dakwah politisi yang dipilih oleh umat yang menempati posisi tertentu itu mestinya harus berorientasi pada kepentingan umat. Seperti halnya dalam mengelola anggaran berpihak kepada kepentingaan umat, bangsa, dan negara.

> Ketiga hal di atas itulah yang menjadi tanggungjawab orang-orang yang duduk di parlemen dalam berdakwah, jadi dakwah politik itu merupakah hal sangat penting dalam upaya menyusun langkah-langkah strategis dan praktis bagaimana umat itu harus diberdayakan menjadi lebih baik, disampaikan dengan baik dan melalui cara-cara yang baik pula. Ketiga hal itu kalau kemudian itu dilakukan saya kira dakwah sungguh yang luar biasa.[18]

[18] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baddrut Tamam menilai bahwa cara-cara di atas memiliki kandungan dakwah yang cukup strategis. Pasalnya dalam konteks dakwah politik berbeda dengan dakwah pada umumnya—sebagaimana yang dilakukan para da'i—yang dilakukan di masjid-masjid, tabligh akbar, pengajian, ceramah, pesantren dan lainnya. Dakwah politik penuh dengan gesekan-gesekan kepentingan antar partai, antar ideologi, antar anggota DPRD, karena itulah dalam dakwah politik harus mengedepankan politik yang santun dengan pendekatan-pendekatan yang kreativ dan variatif.

> "Salah satu contohnya adalah untuk duduk di DPRD saja kita harus mengalami berbagai macam gesekan ketika pemilu, dan gesekan-gesekan itu juga terjadi katika sudah duduk di DPRD, dimana ada pertarungan kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing partai politik. Namun kita harus mengelolanya dengan baik, dan menjadikan politik sebagai sarana mencapai tujuan maka tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip poltik yang santun, yang bersahaja yang tidak *money* politik dan tidak mengintimidasi"[19]

b. Politik Sebagai Media Amar Ma'ruf nahi Munkar

Pemahaman yang tak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Ahmad Heri, Anggota DPRD Jatim dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa antara dakwah dan politik memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dimana dakwah dan politik saling melengkapi dalam rangka menciptakan kehidupan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam, baik hidup dalam berbangsa, bernegara ataupun beragama.

[19] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Ahmad Heri, dakwah merupakan ajakan kepada kebaikan *(yad'u ilal khair)* yang mengandung makna *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sarana juga sarana politik yang dipahami sebagai sebuah ikhtiyar dalam kontek kekuasaan yang legal formal.

> "Pada konteks ini bagaimana seorang politisi yang bisa dikatakan kaum santri atau bisa dipandang orang yang taat beragama tapi dia menerima dunia politik dakwahnya itu *bil hal,* sedangkang dalam konteks yang lain menggunakan media politik itu sebagai pengambilan keputusan yang pro- rakyat, pro-kejujuran, pro-kesejahteraan walaupun dalam politik kejujuran sejati tidak akan pernah ada karena kejujuran itu adalah sebuah keterpihakan. keterpihakan kepada siapa? kapan kepentingan politik itu muncul ? kapan kemudian politik itu akan diberlakukan untuk kepentingan apa? disitulah yang dinamakan kepentingan politik dan kejujuran politik."[20]

Dalam hal ini, Ahmad Heri menilai seorang da"i yang berdakwah melalui jalur politik sebenarnya bisa lebih efektif dalam menjalankan *amar ma'ruf naihi munkar* sesuai dengan ajara Islam. Karena seorang politisi muslim juga memiliki tanggungjawab dalam berdakwah pada posisi dimana mereka telah diamanatkan.

> "Kalau saya harus memutuskan unsur-unsur perda. maka mau tidak mau saya harus menelorkan yang pro-rakyat. misalnya perlindungan kepada petani, bantuan hukum kepada masyarakat miskin, perlindungan tenaga kerja atau kepada buruh. inilah yang kemudian di telorkan sebagai politisi dalam bentuk aturan."[21]

---

[20] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[21] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, secara individu seorang politisi juga memiliki tanggungjawab moral sebagaimana da"i-da"i pada umumnya. Artinya menurut Ahmad Heri seorang politisi juga harus memberikan contoh yang baik dan memiliki *akhlakul karimah* yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat.

> "Sedangkan politisi dalam bentuk prilaku dan sikap tidak boleh tidak harus menerapkan akhlakul karimah baik secara *qaulan wa fi'lan wa fikron* (perkataan, perbuatan dan pemikiran), baik dalam percaturan politik dalam parlemen ataupun non-parlemen"[22]

Ahmad Heri juga tidak memungkiri, jika realitas dakwah politik cukup berbeda dengan dakwah pada umumnya. Dimana dalam dakwah politik seorang politisi juga harus mensinergikan antara urusan agama dengan urusan negara. Dan tentunya kalau melihat realitas kehidupan politik di Negara Indonesia yang multi partai setiap politis akan berhadap-hadapan dengan berbagai macam kepentingan yang diusung oleh masing-masing partai, karena itulah seorang politisi yang memiliki tanggungjawab untuk berdakwah juga harus mengedapankan gaya komunikasi yang persuasif dan santun dalam mengkomodir setiap kepentingan agar senantiasa selaras dengan kepantingan umat atau masyarakat.

> "Kalau di parlemen tatkala dia melakukan komunikasi politik kebijakan dia mestik melakukan politik yang santun. Kalau kemudian komunikasi non parleman dia akan menunjukan sebagai prilaku umat Islam atas seorang muslim yang sejatinya dia bisa menyatu dengan konstituennya, komunitasnya dan bisa menjadi bagian sebagai politisi menjadi pusat aduan persoalan,

[22] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pusat terkumpulnya informasi, menjadi pusat figur yang bisa dikatakan berprilaku yang Islami dan berpolitik yang *akhlakul karimah*."[23]

2. Metode Dakwah Politik

Kalau melihat data-data dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa metode dakwah politik yang digunakan oleh politisi yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur yaitu meliputi:

a. Dakwah *Bil Hikmah* (Keteladanan)

Baddrut Tamam, ia menuturkan bahwa sebagai seorang politisi yang duduk diparlemen sebagaimana diamanahkan oleh rakyat maka mereka harus memberikan contoh-contoh yang baik, atau teladan yang baik. Baik sebagai seorang individu yang harus mengedapankan akhlakul karimah ataupun sebagai seorang politisi yang santun dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan atau langkah-langkah yang diambilnya.

"Dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dakwah politik kita harus memulai dari memberikan perilaku contoh yang baik, karena harus ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan tindakan. kalau yang disampaikan baik terus tetapi tindakannya tidak sebaik apa yang diucapkan itu bukan mengajak, tetapi malah terjadi kontra produktif"[24]

Dalam hal ini Baddrut Tamam menegaskan bahwa dalam konteks mengajak kepada kebaikan harus dimulai dengan kebaikan diri sendiri. Seperti halnya untuk mencegah terjadinya korupsi

[23] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[24] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilingkungan anggota DPRD Jatim Baddrut Tamam mengatakan kalau harus dimulai dari dirinya sendiri agar tidak korupsi. Sehingga dengan demikian para anggota dewan yang lain akan mengikuti dan mencontoh prilaku tersebut.

> "Ya harus dilakukan, karena prilaku korupsi itu menjaukan diri dari sifat-sifat perjuangan partai politik. walaupun korupsi bisa di mana saja tidak hanya terjadi di DPRD ataupun di eksekutif tapi bisa terjadi dimana-mana. Korupsi itu sebenarnya mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengurangi jam kerja itu korupsi. hampir bisa kita lakukan untuk tidak melakukan itu".[25]

Namun disamping itu, Baddrut Tamam juga mengedapankan langkah-langkah praktis dalam menyampaikan dakwah, dia bahkan menuturkan bahwa sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim ia senantiasa mengajak dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk memberdayakan umat atau masyarakat dan hal tersebut harus dilakukan dengan manajemen yang baik.

> "Untuk menunjukkan iktikad baik kita juga dibutuhkan manajemen yang baik pula, dimana dalam hal ini pola sinergitas dengan fraksi yang lain harus bagus. pola keterbukaan temen-teman dalam penyampaian dinamika, ritme semakin bagus termasuk didalamnya kegiatan fraksi yang dikerjakan seperti bakti sosial."[26]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Heri, menurutnya prilaku individu sebagai seorang politisi yang lahir dari latar belakang agama yang kuat harus menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang

---

[25] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[26] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak di contoh, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan moral secara lisan namun kehidupan pribadinya penuh dengan kesalahan dan penyimpangan. Karena itulah menurutnya dalam konteks dakwah politik hal pertama yang harus dibenahi adalah prilaku individu para politisinya. Dalam hal ini Ahmad Heri menyadari kalau posisinya sebagai anggota DPRD yang memili latar belakang agama yang kuat dari kultur kehidupan yang Islami ia mengakui bahwa tanggungjawabnya sangat besar dalam menjaga amanah rakyat.

> "Menjaga prilaku diri kita itu merupakan sebuah keharusan dan kita melakukan dakwah politik itu secara otomatis, secara tidak langsung prilaku-prilaku yang selama kita lakukan apalagi kita tahu temen-temen yang dari Partai Nasdem—kebetulan saya berangkat dari partai Nasdem—mau tidak mau orang sudah tahu kalau saya dulu aktivis NU, kemudian juga dikatakan aktivis kaum sarungan dan cerminan itu tidak bisa ditutup-tutupi tentang prilakunya dan disitulah cerminan itu muncul dan itu mesti harus dilakukan siapapun dan kapanpun".[27]

Penjelesan di atas menunjukkan bahwa dakwah politik tidak hanya dakwah dengan hanya berceramah dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk tekstual, namun dalam dakwah politik merupakan wilayah dakwah bil hal dan bil hikmah, dimana seorang politisi tidak hanya dituntut menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kebenaran agama namun juga membawa anggota parlemen yang lain untuk berorientasi pada kepentingan umat sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

[27] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jadi dakwah kami bukan hanya bil qaul saja, tapi juga sudah berbentuk program kerja, kebijakan, aturan yang kesemuanya itu berorientasi pada pemberdayaan dan kebaikan kehidupan bersama".[28]

Ahmad Heri juga mencontohkan bahwa persoalan dakwah pemberdayaan dimana ada masyarakat kita yang perlu proses pemberdayaan, maka sebagai anggota DPRD Jatim mereka harus memberdayakannya. Dan hal tersebut bisa tertuang dalam bentuk undang ataupun perda yang memihak pada pemberdayaan masyarakat.

> "Kalau masalah anggaran kita carikan, kalau membutuhkan saran dan pembangunan kita usahakan melalui dana anggaran yang sudah ada, dan itu di jatah oleh APBD. Jadi penggunaan APBD juga sudah ada aturan-aturannya sendiri yang telah diamanahkan, jadi tidak bisa dengan semena-mena."[29]

b. Dakwah *Bil Mau'idhah Hasanah*

Metode dakwah politik yang kedua adalah menggunakan dakwah *Bil Mau'idhah Hasanah* yaitu metode dengan menggunakan nasehat-nasehat atau peringatan-peringatan yang baik. Dalam konteks ini Baddrut Tama menjelaskan bahwa selama ini pihaknya senantiasa membanguna opini yang baik kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan ataupun terkait dengan fenomena-fenomena politik yang harus disikapi. Namun hal tersebut tidak hanya dilakukan kepada masyarakat namun juga dilinkungan parlemen Baddrut Tamam mengaku

---

[28] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib.

[29] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senantiasa mengingatkan antar sesama terkati dengan tugas dan fungsi DPRD di parlemen.

> "Ya kita juga membangun opini dikoran terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil agar masyarakat juga mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan yang kami buat, karena memang orientasi dakwah membuat transformasi, mengubah perilaku orang dengan cara mengajak bukan memerintah"[30]

Disamping itu, Baddrut juga mengaku kalau kerap kali ia mengingatkan sesama anggota dewan agar amanah dalam menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) pasalnya, mengajak orang tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum itu juga dakwah.

> "Jadi kalau menurut saya dakwah itu tidak hanya mengajak orang untuk shalat, dzikir, zakat, puasa, tapi mengajak orang untuk menjaga stabilitas negara, mengajak orang tidak melanggar hukum, itu juga merupakan dakwah. Dan hal tersebut kerap kali saya sampaikan secara lisan kepada teman-teman di parlemen,"[31]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Heri, ia juga menuturkan bahwa selama ini, dakwah *bil mau'idha hasanah* juga kerap dilakukan namun dengan gaya yang berbeda sebagaimana da"i pada umumnya. Ia mencotohkan bahwa APBD merupakan dana negara yang memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak bisa digunakan sewenang-wenang oleh siapapun. Karena itulah ia juga kerap kali

[30] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[31] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepada para anggota dewan dan masyarakat terakait dengan anggaran dana tersebut.

> "Seperti halnya, jika kita memberikan bantuan kepada masyarakat kita juga menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan amanat jadi mereka harus menggunakannya dengan amanah pula, harus ada laporannya. Nah dalam konteks inilah kita juga berdakwah kepada masyarakat bawah, agar kalau ada bantuan kita ingatkan ini bukan dana pemberian tapi ini dana masyarakat yang harus dipertanggunjawabkan".[32]

Metode dakwah bil mau"idah hasanah tidak hanya dilakukan melalui lisan saja, namun Ahmad Heri juga menegaskan bahwa hal tersebut juga dilakukan melalui tulisan diberbagai medai baik cetak ataupun online. Dimana konteks pesan yang disampaikan berupa berbagai macam fenomena dan produk peraturan daerah yang telah dibuat, akan tetapi didalamnya juga tersirat nilai-nilai ajaran Islam tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik.

> "Kalau gagasan atau ide dalam bentuk tulisan pernah kita lakukan baik itu melalui wawancara ataupun kita menelorkan gagasan dalam bentuk tulisan tertentu yang dimuat di berbagai media massa terkait dengan perda-perda yang kita miliki harus berkelanjutan istilahnya ada perkupnya, kemarin kita sudah komunikasi dengan temen-temen media agar dimunculkan perkup dari perda-perda yang belum ada perkupnya, yang mana inti dari perda tersebut adalah demi kebaikan kita bersama".[33]

> "Cara yang saya lakukan dengan saling mengingatkan terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang politisi, legislator setidak-tidaknya kita bisa saling membantu apalagi dalam

[32] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[33] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komisi, fraksi maupun dalam lembaga-lembaga saat dalam proses persidangan bagaimana kemudian menjaga amanah".[34]

c. Dakwah *Bil Mujadalah* (Diskusi)

Dakwah *Bil Mujadalah* (Diskusi) menjadi metode yang kerap kali dipakai oleh para da"i politisi dilingkungan parlemen, namun diskusi di sini bukanlah diskusi terkait dengan tema-tema agama, namun lebih pada persoalan diskusi tentang bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya adalah bahwa diskusi yang kerap kali digunakan adalah berkisar pada langkah-langkah strategis bagaimana membangun kehiupan masyarakat yang lebih baik. Karena itulah menurut Baddrut Tamam dalam rangka berdakwah itulah ia mengatakan harus bersinergi dengan anggota parlemen lainnya demi kepentingan rakyat.

> "Secara substansial dalam setiap kesempatan diskusi atau dalam rapat kami senantiasa berupaya dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak ke kepentingan rakyat. Seperti halnya bagaimana agar pendidikan di lingkungan madrasah diniyah bisa mendapatkan anggaran dana untuk pengembangan. Namun hal itu tentunya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari berbagai aspeknya."[35]

Lebih lanjut Baddrut Tamam menegaskan bahwa berdakwah dengan metode diskusi tersebut memang merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan pemahaman terhadap anggota parlemen dan masyarakat tentang bagaimana nalai-nilai universal

[34] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[35] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk melakukan hal tersebut tidak hanya bisa disampaikan secara lisan saja, namun juga melalui forum-forum yang komunikatif dengan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan santun.

> "Mengajak itu bahasanya tidak harus „wahai orang-orang anggota DPR maka jauhilah korupsi", tapi kita mengajaknya itu melalui sistem bukan pendekatan bahasa. Dalam mejalankan sistem nanti ada perdebatan didalamnya pasti ada."[36]

Dalam perdebatan atau pun diskusi tentunya akan terjadi pertarungan pemikiran dari berbagaimacam paradigma dan kepentingan, tetapi sejatinya menurut Baddrut Tamam semua anggota DPRD Jatim memiliki tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat agar bisa hidup lebih baik. Namun dalam setiap menentukan kebijakan Baddrut Tamam kerap kali memberikan masukan-masukan untuk memperhatikan kehidupan umat Islam.

> "Seperti halnya, pada setiap rapat kami harus memikirkan kiai langgar, guru ngaji, yang sudah turut mengabdi mendidik masyarakat. Dan disitulah kita harus berdiskusi bagaiman membuat kebijakan dalam rangka memberdayakan mereka, tapi tidak hanya itu juga, kami juga sering berdiskusi hebat untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada mereka dan para kelompok mustadafin, nelayan, petani dan lain sebagainya melalui pemberdayaan ekonomi, dan saya kira ini juga termasuk bagian dari dakwah."[37]

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ahmad Heri, ia menutuukan bahwa realitas diparlemen berbeda dengan realitas yang

---

[36] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[37] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi oleh da"i pada umumnya, di lingkungan parlemen terhimpun semua golongan dan kepentingan yang bertarung baik agama, partai, konstituen, dan lain sebagainya, hal itulah yang membuat ruang-ruang diskusi terbuka semakin lebar. Namun ia menggaris bawahi bahwa pihaknya sangat jarang membahas hal-hal yang sifatnya sensitif seperti masalah aqidah. Karena menurutnya hal tersebut bisa menyinggung dan menjadi bibit perpecahan.

> "Jadi kami menghindari hal-hal yang bersifat sensitif, karena di DPR itu bercampur berbagai macam kepentingan, bersinggungan dengan bermacam aliran. Kita dakwahnya yaitu dakwah yang morality kalau menyinggung persoalan agama yang sensitif setidak-tidak kita harus memberikan penjelasan yang lebih di terima oleh akal dan kebijakan politik."[38]

Ahmad Heri juga menuturkan bahwa dirinya kerap kali berdiskusi dengan sesama anggota dewan dalam berbagai macam forum, baik rapat, jejak pendapat, dan forum-forum lainnya. Menurutnya diskusi merupakan salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh politisi untuk menyeragamkan pandangan. Pasalnya produk yang mereka hasilkan adalah berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang akan diikuti oleh pemerintah (eksekutif) dan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai macam pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

> "Kebetulan saya dalam proses memimpin rapat komisi sering kali saya menyampaikan khususnya bahwa kita akan menelorkan perda, perda ini akan menjadi aturan-aturan yang

[38] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengatur masyarakat jawa timur juga dibutuhkan ketaatan aturan oleh masyarakat, logikanya yang saya bangun perda itu harus dirumuskan dengan baik. Dan disinilah kita berdiskusi dengan berbagai macam pemikiran dan pandangan, walaupun juga kerap kali terjadi intrik, namun tetap mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai mufakat."[39]

3. Pendekatan Dakwah Politik

Dakwah Politik oleh Anggota DPRD Jatim dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural sebagai pendekatan utama dan pendekatan kulturan sebagai pendekatan persuasif. Kedua pendekatan tersebut kerap kali mereka pakai dalam rangka menyeleraskan pemahaman dalam upaya menciptkan dinamikan kehidupan politik diparlemen tetap dalam koridor kesantunan dan berorientasi pada kepentingan umat.

Baddrut Tamam sendiri menegaskan bahwa menjadi anggota DPRD Jatim sebenarnya adalah jabatan struktural dalam sistem kenegaraan yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Ia menjelaskan bahwa sebagai Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai PKB ia menjelaskan bahwa masing-masing partai punya mandat sendiri pada setiap kadernya yang duduk menjadi anggota dewan.

> "Di partai PKB itu ada landasan perjuangan. misalnya ini saya kategorikan dakwah dimana semua anggota fraksi diminta untuk memperjuangkan anggaran untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, penyetaraan pendidikan mulai dari madrasah yang di desa-desa sampai kesekolah di kota-kota, fasilitasnya kita dorong untuk sama walapun tidak sama persis".[40]

---

[39] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[40] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi secara struktural menurut Badrut pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperjuangkan aturan ataupun kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umat dan masyarakat. Dimana aturan-aturan tersebut yang nantinya akan di eksekusi oleh pemerintah daerah.

> "Jadi secara struktur kita memang memiliiki peran untuk membuat perda, mengontrol dan mendorong agar pemerintah senantiasa bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena prinsipnya bantuan itu bukan dari anggota DPRD tapi dari pemerintah. Tapi yang mengusulkan dan memperjuangkan untuk dimasukan kedalam perda itu kita (anggota DPRD)."[41]

Pilihan pendekatan Struktural ini juga ditegaskan oleh Ahmad Heri, ia juga menegaskan bahwa pendekatan struktur tersebut tidak hanya ia pakai dalam lingkungan parlemen saja, melainkan juga dalam lingkugan partai. Dengan pendekatan sturktural ini, dakwah politik memiliki legitimasi yang kuat melalui produk-produk aturan yang mereka buat dalam menata kehidupan masyarakat yang lebih baik.

> "Kita melakukan pendekatan structural itu memang sudah secara otamatis, dalam konteks bernegara kita bagian dari sistem yang memiliki struktur jadi kita melakukan komunikasi dengan mekanisme tertentu tidak langsung sembaranga. Demikian juga dengan partai, masing-masing partai memiliki struktur tersendiri."[42]

Dalam hal inilah Ahmad Heri mengungkapkan bahwa dakwah politik yang dilalkukan dilingkungan parlemen penuh dengan kontrol dan melalui prosedur-prosedur tertentu, dimana masing-masing anggota dewan

---

[41] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[42] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mengawasi dan mengevaluasi serta mereka juga harus bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Namun disamping pendekatan struktur baik Baddrut Tamam ataupun Ahmad Heri juga melakukan pendektan kultural dalam dakwah politiknya, keduanya sama-sama menyadari bahwa dilingkungan parlemen terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, partai plitik dan tradisi yang berbeda-beda. Karena itulah disamping pendekatan-pendekatan struktur (formal) juga dibutuhkan pendekatan-pendekatan kultural (informal).

> "Hal itu bisa kita lakukan di luar-luar forum-forum resmi, sambil minmum kopi dan lainnya, kita semua sama-sama saling mengatahui tujuan kita secara umum, yaitu kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena itulah kita kerap kali saling berdiskusi, dan berbagi pemahaman tentang berbagai hal"[43]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Heri, menurutnya ia mengatakan bahwa sesama orang Jawa Timur pendekatan kultur itu dinilai sangat penting, ia mengatakan bahwa walaupun berangkat dari berbagai macam partai namun kebanyakan diantara teman-teman mereka di parlemen memiliki latar belakang aliran keagamaan yang sama yaitu berlalatar NU dan Muhammadiyah. Dan disinilah ia kerap kali tidak menemukan kesulitan untuk menyamakan persepsi, namun jika berkaitan dengan kepentingan partai mereka kerap kali harus terlibat dalam diskusi

[43] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cukup lama. Namun hal tetap bisa diselesaikan dengan cara yang santun.

> "Kita berangkat dari komunitas yang mempunyai segmentasi budaya. Banyak temen-temen kita yang berbeda partai tapi sesungguhnya mereka berangkat dari komunitas yang sama, sama-sama NUnya dan sama-sama Muhammadiyahnya ada masa-masa agreement (kesepakatan yang tidak tertulis)."[44]

4. Bentuk-Bentuk Dakwah Politik

a. Peraturan Daerah

Menurut Baddrut Tamam, salah satu bentuk dakwahnya selama ini ia lakukan adalah berupa bentuk-bentu peraturan daerah, di mana keberadaan peraturan-peraturan tersebut sebenarnya bertujuan dalam rangka mengatur dan menciptakan sistem kehiudupan masyarakat yang berdaya, makmur, adil, dan sejahtera sebagaimana telah diajarkan dalam nilai-nilai universal agama Islam.

> "Bentuk dakwah kami itu bisa dilihat dalam berbagai macam peraturan daerah, dan dari situ bisa dilihat bahwa peraturan tersebut dibuat dalam rangka mencitpakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya Perda tentang perlindungan petani, Perda bantuan hukum untuk orang miskin. Dan lainnya.[45]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Heri, ia menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dakwah Anggota DPRD bisa dilihat dari ketiga fungsi pokok anggota DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

---

[44] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[45] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi control. Fungsi legislasi itu berarti yang melahirkan berbagai macam peraturan daerah. Sedangkan fungsi Anggaran adalah mengatur dan menyusun anggaran, dan mengontrol bagaiamana peraturan tersebut dijalankan.

> "Kita melihat umpamanya dakwah riil ini ada larangan minuman beralkohol ini sudah ada ini juga terkait dengan *Amar Makruf Nahi Mungkar*. Kemudian perda tentang perjudian dan sudah berjalan, dan perda tidak menjual minuman yang beralkohol sembarangan dengan kadar alcohol yang cukup tinggi dan dipasarkan secara bebas. Hal ini untuk mempersempit ruang untuk ruang jual beli agar hal yang menimbulkan mudarat ini tidak bisa kemudian dibeli oleh masyarakat, ini tidak mau tidak sudah kategori dakwah. Larangan prostitusi contoh riilnya. Kemudian peraturan tempat hiburan malam yang di tengerai tempat transaksi seksual dan penyimpangan yang lain itu kita persempit dengan perda."[46]

Ahmad Heri juga menegaskan bahwa selama ini, peraturan-peraturan tersebut dibuat dalam rangka membela hak-hak orang-orang lemah, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Hal tersebut dilakukan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, adil dan makmur sebagaimana telah tertuang dalam Alquran dan Hadits.

> "Umpamanya bantuan hukum masyarakat miskin, perlindungan petani ini secara tidak langsung merupakan pendampingan, kepedulian kepada masyarakat yang mustadafin. Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin baru diputuskan, sedangkan bantuan perlindungan petani ini sedang diproses dalam pembahasan, dan beberapa perda yang masih dalam tahap usulan."[47]

---

[46] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[47] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dana Pemberdayaan

Sedangkan bentuk lain dari dakwah politik adalah menyusun anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, artinya mereka juga bertugas untuk mengalokasikan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemberdayaan masyarakat sehingga bisa tercipta kehiduapan masyarakat yang sejahtera.

Hal ini juga ditegaskan oleh Baddrut Tama, ia menuturkan bahwa salah satu tugasnya diparlemen adalah memberikan pelayanan terbaik kepada umat, salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan dana APBD untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat miskin.

> "Dalam konteks dakwah, DPRD sebagai pengambil kebijakan di Propinsi Jatim mestinya anggarannya dialihkan kepada bagaimana kemudian masyarakat itu mendapat pemberdayaan akses modal, akses pemberdayaan dan pembangunan serta pemerataan untuk keadilan pembangunan pemberdayaan dimasing-masing daerah."[48]

Dia juga melanjutkan jika hal tersebut dilakukan dimasing-masing anggota DPRD, maka dakwah politik bisa menjadi dakwah yang luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa hal itulah yang selama diperjuangkan. Ia juga menegatskan bahwa inti dari perjuangan dakwahnya adalah untuk mendorong agar masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik dan murah.

[48] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Heri juga mengamini hal tersebut, ia menuturkan bahwa sebagai Anggota DPRD Jawa Timur, keberpihakannya kepada rakyat miskin merupakan hal yang tak bisa ditawar, demikian juga kepada kepentingan ummat. Ia menuturkan disamping menelorkan peraturan-peraturan, DPRD juga memilki tugas untuk mengalokasikan anggaran dana pengembangan danpemberdayaan masyarakat.

> "Misalnya ada masjid membutuhkan bantuan, ada petani yang membutuhkan modal usaha terkait dengan pelengsengan pengairan, dan lain sebagainya itu nanti kita carikan anggrannya, dan hal inilah bentuk dakwah kami. Namun juga dan itu disesuaikan kebutuhan pembangunan lainnya, seperti halnya kebutuhan pembangunan jalan desa maupun jalan kecamatan, ini adalah bentuk yang kawan-kawan di parlemen."[49]

[49] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

DAKWAH POLITIK ANGGOTA DPRD JATIM

A. Temuan Hasil Penelitian

1. Unsur-Unsur Dakwah dalam Politik

a. *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Dalam dakwah politik yang menjadi topik dalam penelitian ini juga bisa dikatakan terdapat aktivitas dakwah. Jika dilihat dari sisi unsur-unsur dakwah maka yang menjadi da'i adalah para anggota DPRD Jatim Surabaya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Baddrut Tamam dan Achmad Heri, mereka mengatakan bahwa dalam dakwah politik yang menjadi aktor utama adalah anggota DPRD sebagai pemegang kebijakan yang melahirkan berbagai macam aturan-aturan dalam rangka memperbaiki sistem kehidupan masyarakat.

> "Kalau dalam konteks dakwah politik, anggota DPR menjadi pelaku utama, dakwah politisi yang dipilih oleh umat yang menempati posisi tertentu itu mestinya dalam mengelola anggaran berpihak kepada kepentingaan umat, bangsa, dan negara."[1]

Demikian juga dengan Achmad Heri, ia mengatakan bahwa para politisi khususnya mereka yang memiliki latar belakang pesantren harus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tujuan dakwah.

[1] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kalau saya harus memutuskan unsur-unsur perda (peraturan daerah), maka mau tidak mau saya harus menelorkan yang pro-rakyat. misalnya perlindungan kepada petani, bantuan hukum kepada masyarakat miskin, perlindungan tenaga kerja atau kepada buruh. Inilah yang kemudian di telorkan sebagai politisi dalam bentuk aturan"

Lebih lanjut mereka juga berpendapat, bahwa dalam konteks dakwah para politisi khususnya yang duduk di parlemen memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan ummat berdasarkan posisi jabatan yang telah mereka amanatkan. Mereka yang masuk sebagai anggota DPRD memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera dengan memperbaiki sistem kehidupan yang bisa mereka tuangkan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Di sinilah posisi mereka selaras dengan da'i yang juga bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk peraturan-peraturan.

b. *Mad"u*(Objek Dakwah)

Menurut Achmad Heri yang menjadi objek dakwahnya selama ini adalah Anggota DPRD Jatim, Pemerintah, dan Masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dihasilkan oleh anggota DPRD akan dieksekusi oleh pemerintah agar bisa diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah menurutnya seorang politisi harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

> "Politisi itu kan segmentasinya banyak bisa kepada pemegang kebijakan agar mereka tidak memanipulasi kebijakan, kepada pemerintah agar mereka menjalankan peraturan, dan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstituen/masyarakat agar mengikuti aturan-aturan yang ada. Di Sinilah dakwah politik itu dilakukan untuk disemua lapisan khususnya tatkala kita bertemu dengan konstituen yang berada di lapisan bawah."[2]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Baddrut Tamam, baginya sebagai seorang politisi yang mengemban misi Dakwah maka objek dakwah mereka adalah seluruh masyarakat, khususnya masyarakat jawa timur dalam semua lapisannya.

"Sasaran dakwah kita adalah semua orang, semua masyakrat Jawa Timur karena kebijakan DPRD Jawa Timur berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Timur secara umum, termasuk juga didalamnya adalah anggota DPRD itu sendiri, jadi Dakwah itu mesti dimulai dari memposisikan dirinya ditengah-tengah anggota DPRD agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dulu. Seperti halny menghindari diri kita untuk melakukan korupsi ataupun menghancurkan kekuatan lain. Agar hal ini juga bisa ditiru dan dilakukan oleh anggota DPRD yang lain. Jika semua anggota DPRD itu sudah baik, maka bisa dipastikan sistem kehidupan masyarakat juga akan baik.,"[3]

c. *Maudu"*(Pesan Dakwah)

Sedangkan kalau dilihat dari konteks pesan dakwah secara spesifik memang terdapat perbedaan dengan dakwah pada umumnya, dalam dakwah politik, para politisi tidak lagi menyampaikan pesan-pesan tekstual keagamaan yang bersumber dari ayat-ayat suci Alquran ataupun Hadits, namun pesan-pesan yang mereka sampaikan sudah

[2] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[3] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk aturan-aturan yang secara substansial berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam

Baddrut Tamam menegaskan bahwa dakwah itu merupakan sebuah seruan atau ajakan kepada kebaikan yang bisa berbentuk apa saja, tidak hanya menyuruh atau mengajak manusia untuk shalat, puasa, ataupun zakat, tapi mengajak masyarakat untuk turut menjaga stabilitas kehidupan negara, menjaga sistem pemerintahan, mengikuti aturan, dan lain sebagainya adalah bagian dari pesan dakwah.

> "Jadi memahami dakwah itu bukan hanya menyampaikna sesuatu yang baik. misalnya ajakan ikut bershalat itu dakwah tapi itu tidak satu-satunya cara untuk dakwah. Dakwah itu harus dipahami lebih luas. mengajak orang untuk menjaga statbilitas itu dakwah, menjaga orang bersinergi itu dakwah. mengajak orang tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum itu juga dakwah, dan hal itulah yang kami ingin sampaikan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD."[4]

Akan tetapi Achmad Heri memiliki pandangan yang berbeda, baginya pesan-pesan dakwah yang disampaikan tidaklah selalu bermuatan teks semata, tapi dia menekankan pesan-pesan keteladanan yang harus dipegang teguh oleh semua anggota DPRD sebagai seoarang da'i dalam konteks dakwah politik

> "Kalau parlemen itu sesungguhnya adalah lembaga politik yang formal, mau tidak mau tampilannya kita espektasinya harus perfect, maka prilaku, pemikiran juga harus terhormat, melakukan kebijakan-kebijakan juga harus terhormat. Ini yang kita ingatkan kepada mereka sesama anggota parlemen."[5]

---

[4] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[5] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itulah menurut Achmad Heri, Seorang polisi harus mampu memuat pesan-pesan keteladanan dalam setiap prilakunya sebagai anggota DPRD, pasalnya selama ini, DPRD dianggap sebagai kedudukan yang terhormat dalam sistem kenegeraan karena itulah tugas utama seorang anggota DPRD adalah memberikan pesan akhlakul karimah melalui perilakunya sehari-hari.

> "Sebab proses penyadaran diri akan *possitioning* keterhormatan tersebut sebenarnya lahir dengan harapan masyarakat pada umumnya dapat mencontoh apa yang kita lakukan. Jangan sampai keterhomatan itu kemudian dikotori oleh sebuah prilaku-prilaku yang tidak terhormat contohnya tidak amanah, korupsi, amoral dan kongkalikong politik yang sesungguhnya sangat merugikan rakyat, dan hal ini sesungguhnya mencederai dakwah politik."[6]

d. *Uslub* (Metode Dakwah)

Baddrut Tamam ia menuturkan bahwa sebagai seorang politisi yang duduk diparlemen para anggota DPRD dituntut untuk berpilaku baik dan terhormat serta memberikan keteladanan kepada masyarakat dan mengedepankan akhlakul karimah dengan cara berpolitik secara santun dan profesional.

> "Dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dakwah politik kita harus memulai dari memberikan perilaku contoh yang baik, karena harus ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan tindakan. kalau yang disampaikan baik terus tetapi tindakannya tidak sebaik apa yang diucapkan itu bukan mengajak, tetapi malah terjadi kontra produktif"[7]

> "Seperti halnya untuk mencegah korupsi, maka hal itu harus dimulai dari diri sendiri. Artinya kita harus mempu mencegah

[6] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[7] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri kita agar tidak korupsi sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Disamping itu, prilaku korupsi itu menjaukan diri dari sifat-sifat perjuangan partai politik."[8]

Disisi yang lain, prilaku tersebut juga harus dibarengi dengan langkah-langkah praktis, Baddrut mengatakan bahwa DPRD juga kerap kali mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, pelatihan dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk para konstituennya.

Baddrut juga menjelaskan jika terjadi penyimpangan dalam prilaku anggota DPRD maka ia tidak pernah segan unttuk menegur mereka, namun hal itu ia lakukan dengan pendekatan dan nasehat yang baik. Baddrut mengaku senantiasa mengingatkan antar sesama terkati dengan tugas dan fungsi DPRD di parlemen.

> "Ya kita juga saling mengingatkan antara sesama anggota dewan, khawatir kebijakan itu keliru dan bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Kiat juga membangun opini dikoran terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil agar masyarakat juga mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan yang kami buat, karena memang orientasi dakwah membuat transformasi, mengubah perilaku orang dengan cara mengajak bukan memerintah". "Jadi kalau menurut saya dakwah itu tidak hanya mengajak orang untuk shalat, dzikir, zakat, puasa, tapi mengajak orang untuk menjaga stabilitas negara, mengajak orang tidak melanggar hukum, itu juga merupakan dakwah. Dan hal tersebut kerap kali saya sampaikan secara lisan kepada teman-teman di parlemen,"[9]

Namun Baddrut Tamam tidak mengingkari bahwa terjadinya perbedaan pendapat di Parlemen memang kerap kali tak bisa dihindar,

---

[8] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

[9] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun demikian ia mengatakan perbedaan tersebut berlansung secara sportif, sehingga jika terjadi ketidaksepamahaman antara anggota parlemen semuanya diselesaikand alam forum-forum diskusi. Dan hal ini dalam rangka mencapai mufakat sehingga bisa melahirkan sebuah kebijakan yang baik.

> "Secara substansial dalam setiap kesempatan diskusi atau dalam rapat kami senantiasa berupaya dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak ke kepentingan rakyat. Seperti halnya bagaimana agar pendidikan di lingkungan madrasah diniyah bisa mendapatkan anggaran dana untuk pengembangan. Namun hal itu tentunya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari berbagai aspeknya,"[10]

Lebih lanjut Baddrut Tamam menegaskan bahwa berdakwah dengan metode diskusi tersebut memang merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan pemahaman terhadap anggota parlemen dan masyarakat tentang bagaimana nalai-nilai universal Islam benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk melakukan hal tersebut tidak hanya bisa disampaikan secara lisan saja, namun juga melalui forum-forum yang komunikatif dengan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan santun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Achmad Heri, hal pertama yang harus dilakukan oleh anggota DPRD adalah memperbaiki dan menjaga prilakunya agar sesuai dengan tuntunan agama Islam, mereka harus memberikan contoh agar tidak berindak curang, tidak korupsi,

[10] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berbuat sewengan-wenang, harus amanah dan lain sebagainya. Karena hal itulah modal utama seorang anggota DPRD yaitu memberi contoh yang baik.

> "Menjaga prilaku diri kita itu merupakan sebuah keharusan dan kita hal itu berarti kita telah melakukan dakwah politik secara otomatis, secara tidak langsung prilaku-prilaku yang selama kita lakukan merupakan salah satu metode dakwah."[11]

Namun sebagai seorang manusia anggota DPRD Jatim juga kerap kali melakukan kesalahan dan kekhilafan, karena itulah diantara mereka menurut Achmad Heri juga saling mengingatkan, sehingga kinerjja yang dilakukan oleh anggota DPRD bisa membawa manfaat yang besar terhadap masyarakat, dan tidak merugikan orang banyak.

> "Cara yang saya lakukan dengan saling mengingatkan terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang politisi, legislator setidak-tidaknya kita bisa saling membantu apalagi dalam komisi, fraksi maupun dalam lembaga-lembaga saat dalam proses persidangan bagaimana kemudian menjaga amanah".[12]

Perbedaan ide dan konsep ketika menyusun sebuah peraturan juga kerap kali terjadi, karena itulah Achmad Heri juga menuturkan bahwa dirinya kerap kali berdiskusi dengan sesama anggota dewan tentang berbagai hal, termasuk ketika akan membahas masalah peraturan ataupun penyusunan kebijakan anggaran lainnya.

> "Kebetulan saya dalam proses memimpin rapat komisi sering kali saya menyampaikan khususnya bahwa kita akan menelorkan perda, perda ini akan menjadi aturan-aturan yang

[11] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[12] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur masyarakat jawa timur juga dibutuhkan ketaatan aturan oleh masyarakat, logikanya yang saya bangun perda itu harus dirumuskan dengan baik. Dan disinilah kita berdiskusi dengan berbagai macam pemikiran dan pandangan, walaupun juga kerap kali terjadi intrik, namun tetap mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai mufakat"[13]

e. *Washilah* (Media Dakwah)

Baddrut Tamam dan Achmad Heri menuturkan bahwa selama ini yang menjadi sarana atau media dakwah mereka adalah berupa peraturan daerah sebagai upaya untuk memperbaiki sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Sebagai badan legislatif, media dakwah kita itu berupa peraturan daerah yang memihak dan memperbaiki kehidupan masyarakat, seperti halnya perda tentang larangan perjudian, larangan pelacuran, pembatasan penjualan minumal beralkoho, perda tentang bantuan hukum bagi orang miskin, perda tentang pertanian dan lain sebagainya,"[14]

Hal tersebut juga diamini oleh Baddrut Tamam, namun ia menambahkan bahwa media dakwah lainnya yang kerap kali digunakan adalah melalui tulisan di koran, majalah, kegiatan seminar, forum-forum diskusi, rapat fraksi, televisi, radio dan lain sebagainya.

"Kami juga kerap kali membuat tulisan-tulisan yang dimuat diberabagai media massa, baik cetak, online, radio, ataupun televisi dan internet. Dari situlah kita menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perda-perda dan program-program yang kita miliki."[15]

---

[13] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[14] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

[15] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tujuan Dakwah Politik

Adapun tujuan dari dakwah politik menurut Baddrut Tamam dan Achmad Heri adalah tidak lain dari pemberdayaan dan pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang adil, makmur dan sejahtera. Karena itulah mereka berdua sepakat bahwa semua tujuan dari kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dilahirkan oleh anggota DPRD Jawa Timur hanyalah demi kepentingan masyarakat.

> "Jadi dakwah kami bukan hanya bil qaul saja, tapi juga sudah berbentuk program kerja, kebijakan, aturan yang kesemuanya itu berorientasi pada pemberdayaan dan kebaikan kehidupan bersama".[16]

Sedangkan Baddrut Tamam menambahkan tujuan dari dakwah tersebut juga selaras dengan misi dan visi partai yang mengusungnya menjadi anggota DPRD, dimana inti dari perjuangannya adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat sehingga bisa tercipta kehidupan masyarakat yang baik sebagaimana di cita-citakan oleh islam.

> "Di partai PKB itu ada landasan perjuangan, semua anggota dewan memperjuangkan anggaran dan mendorong kebijakan-kebijakan berpihak kepada petani, nelayan, penyetaraan pendidikan dari madrasah yang di desa-desa sampai kesekolah di kota-kota, fasilitasnya kita dorong untuk sama, walapun tidak sama persis, bantuan langgar dan guru ngaji itu kita juga dorong."[17]

---

[16] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[17] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim

Dari hasil penyajian data dalam bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa para anggota DPRD Jatim memiliki pandangan tersendiri tentang dakwah dan politik, baik Badrut Tamam ataupun Ahmad Hari selaku informan dalam penlitian ini memaparkan point penting dari dakwah politik bagi mereka dalam perpektif yang berbeda-beda. Pandangan-pandangan anggota DPRD Jatim terkait dengan dakwah politik dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

Pertama; Anggota DPRD Jatim menganggap bahwa antara dakwah dan politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, hal ini bisa dilihat dari pendapatnya Badrut Tamam yang mengatakan bahwa pada dasarnya Politik adalah sebagai Dakwah Pemberdayaan Umat.

Konsekwensi dari pandangan ini menurut Badrut Tamam, dakwah yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Jatim meliputi tiga hal yaitu Berdakwah dengan melakukan cara politik yang sehat yang mengarah kepada sifat-sifat kenegarawanan, menggunakan stretegi atau langkah dakwah tepat dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kebersamaan, kebersatuan umat generasi yang akan datang, Dakwah berorientasi pada kepentingan umat.

Sedangkan pandangan yang kedua, mengatakan bahwa Politik Sebagai Media Amar Ma'ruf nahi Munkar. Dalam pandangan ini menegaskan bawha dakwah dan politik saling melengkapi dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kehidupan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam, baik hidup dalam berbangsa, bernegara ataupun beragama.

Hal tesebut tersirat dalam ungkapan Ahmad Heri, yang menyatakan bahwa dakwah merupakan ajakan kepada kebaikan *(yad"uilal khair)* yang mengandung makna *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sarana juga sarana politik yang dipahami sebagai sebuah ikhtiyar dalam kontek kekuasaan yang legal formal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Anggota DPRD Jatim memiliki pemahaman yang sama terkait dengan dakwah politik, dimana mereka memahami bahwa dakwah adalah upaya untuk mengajak kepada kebaikan *(amar ma'ruf nahi munkar)* sedangkan politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri.

Namun realitas dakwah politik tentunya berbeda dengan dakwah pada umumnya baik dari segi unsur-unsur dakwah, metode, pendekatan dan pesan-pesan yang disampaikan. Dalam konteks dakwah politik, seorang politisi memiliki peran masing-masing dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman melalui berbagai macam produk kebijakan dan peraturan yang mereka buat. Dimana kebijakan-kebijakan tersebut harus berorientasi pada kepentingan dan kebaikan umat secara keseluruhan.

Dakwah politik ini harus tampil dengan wajah yang santun dalam setiap komunikasi yang mereka lakukan dan memiliki akhlakul karimah, karena disamping mereka sebagai perwakilan rakyat di parlemen mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus menjadi teladan yang baik dan menjadi pusat pengaduan seluruh kesulitan masyarakat yang akan disampaikan pada pemerintah dan berbuah peraturan-peraturan yang memberdayakan umat.

B. Metode Dakwah Politik

Peneliti menemukan beberapa metode dakwah politik yang digunakan oleh politisi yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur yaitu meliputi:

1. Dakwah *Bil Hikmah* (Keteladanan)

   Metode *dakwah bil hikmah* merupakan salah satu metode yang kerap kali menjadi pilihan utama bagi politisi dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Metode ini sebagaimana dijelaskan oleh Badrut Tamam sebagai seorang politisi yang duduk diparlemen sebagaimana diamanahkan oleh rakyat, harus memberikan contoh-contoh yang baik, atau teladan yang baik. Baik sebagai seorang individu yang harus mengedapankan akhlakul karimah ataupun sebagai seorang politisi yang santun dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan atau langkah-langkah yang diambilnya. Seperti halnya dalam mendakwahkan pentingnya menghindari diri dari kasus korupsi yang selama ini telah menjerat banyak politisi. Maka dalam hal ini menurut Badrut Tamam harus dimulai dari pribadi anggota DPRD untuk mencegah dirinya agar tidak terjebak pada prilaku yang merugikan masyarakat banyak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian halnya dengan Ahmad Heri, ia mengatakan bahwa selama ini sudah menjadi tugas utama seorang politisi untuk terus menjaga citra diri mereka dengan baik dihadapan masyarakat umum. Prilaku individu sebagai seorang politisi yang lahir dari latar belakang agama yang kuat harus menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang layak di contoh, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan moral secara lisan namun kehidupan pribadinya penuh dengan kesalahan dan penyimpangan. Karena itulah menurut dalam konteks dakwah politik hal pertama yang harus dibenahi adalah prilaku individu para politisinya.

2. Dakwah *Bil Mau"idhah Hasanah*

Metode dakwah politik yang kedua adalah menggunakan dakwah *Bil Mau"idhah Hasanah* yaitu metode dengan menggunakan nasehat-nasehat atau peringatan-peringatan yang baik. Dalam konteks ini Baddrut Tama menjelaskan bahwa selama ini pihaknya senantiasa membangun opini yang baik kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait dengan produk-produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan ataupun terkait dengan fenomena-fenomena politik yang harus disikapi. Namun hal tersebut tidak hanya dilakukan kepada masyarakat namun juga di linkungan parlemen. Baddrut Tamam mengaku senantiasa mengingatkan antar sesama terkait dengan tugas dan fungsi DPRD di parlemen yang harus agar amanah dalam menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) pasalnya, mengajak orang tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum itu juga dakwah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Heri, juga menuturkan dakwah *bil mau'îdha hasanah* yang dilakukan berbeda dengan gaya da'i pada umumnya. Ia mencotohkan bahwa APBD merupakan dana negara yang memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak bisa digunakan sewenang-wenang oleh siapapun. Karena itulah ia juga kerap kali memberikan kepada para anggota dewan dan masyarakat terakait dengan anggaran dana tersebut.

Metode dakwah bil mau'idah hasanah tidak hanya dilakukan melalui lisan saja, namun Ahmad Heri juga menegaskan bahwa hal tersebut juga dilakukan melalui tulisan diberbagai medai baik cetak ataupun online. Dimana konteks pesan yang disampaikan berupa berbagai macam fenomena dan produk peraturan daerah yang telah dibuat, akan tetapi didalamnya juga tersirat nilai-nilai ajaran Islam tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik.

3. Dakwah *Bil Mujadalah* (Diskusi)

Dakwah *Bil Mujadalah* (Diskusi) dapat di pahami dari pernyataan Badrut Tamam yang mengatakan bahwa dalam setiap kesempatan diskusi atau dalam rapat kami senantiasa berupaya dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak ke kepentingan rakyat, serta bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Cara tersebut menurut Badrut Tamam merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan pemahaman terhadap anggota parlemen dan masyarakat tentang bagaimana nalai-nilai universal Islam benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ahmad Heri, realitas dakwah diparlemen berbeda dengan realitas yang dihadapi oleh da'i pada umumnya, di lingkungan parlemen terhimpun semua golongan dan kepentingan tulah yang membuat ruang-ruang diskusi terbuka semakin lebar. Namun ia menggaris bawahi bahwa pihaknya sangat jarang membahas hal-hal yang sifatnya sensitif seperti masalah aqidah. Karena menurutnya hal tersebut bisa menyinggung dan menjadi bibit perpecahan. Metode dakwah semacam ini kerap kali berdiskusi dengan sesama anggota dewan dalam berbagai macam forum, baik rapat, jejak pendapat, dan forum-forum lainnya, sehingga bisa menghasilkan sebuah produk kebijakan yang terbaik untuk kepentingan masyakaat umum.

C. Pendekatan Struktur dan Kultur dalam Dakwah Politik

Melihat data wawancara dengan informan, para politisi menggukan dua pendekatan dalam melakukan dakwah politik. Yaitu meliputi pendekatan struktural dan pendekatan cultural. Pendekatan struktural merupapakan pendekatan utama yang dipakai demi tercapainya tujuan dakwah itu sendiri. Pendekatan ini memang cukup realitistis, mengingat jabatan anggota DPRD Jatim sebagai jabatan struktural dalam sistem kenegaraan yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.

> "Jadi secara struktur kita memang memiliiki peran untuk membuat perda, mengontrol dan mendorong agar pemerintah senantiasa bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena prinsipnya bantuan itu bukan dari anggota DPRD tapi dari pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tapi yang mengusulkan dan memperjuangkan untuk dimasukan kedalam perda itu kita (anggota DPRD)."[18]

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Badrrut Tamam dan Ahmad Heri, keduanya sepakat bahwa pendekatan struktural tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas-tugas Anggota DPR. Hal tersebut tidak hanya digunakan dalam lingkungan DPRD saja namun juga dimanfaatkan dalam dakwah politik dalam lingkungan partai masing-masing sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam setiap pembuatan kebijakan yang diperlukan.

Namun pendekatan dakwah politik menurut Baddrut Tamam dan Ahmad Heri tidak berhenti hanya pada pendekatan saja, tapi juga memakai pendekatan lainnya, yaitu pendekatan kultural. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi dakwah yang bersifat persuasive. Pendekatan ini dapat dilihat dari ungkapan Badrut Tamam dan Ahmad Heri yang menyatakan:

> "…..hal itu bisa kita lakukan di luar-luar forum-forum resmi, sambil minmum kopi dan lainnya, kita semua sama-sama saling mengatahui tujuan kita secara umum, yaitu kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena itulah kita kerap kali saling berdiskusi, dan berbagi pemahaman tentang berbagai hal."[19]

> "Kita berangkat dari komunitas yang mempunyai segmentasi budaya. Banyak temen-temen kita yang berbeda partai tapi sesungguhnya mereka berangkat dari komunitas yang sama, sama-sama NUnya dan sama-sama

[18] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[19] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyahnya ada masa-masa agreement (kesepakatan yang tidak tertulis)."[20]

D. Bentuk-Bentuk Dakwah Politik

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah bentuk dakwah politik yang selama ini dilakukan oleh anggota DPRD Jatim. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan Badrut Tamam yang mengatakan bahwa keberadaan peraturan-peraturan tersebut sebenarnya bertujuan dalam rangka mengatur dan menciptakan sistem kehiudupan masyarakat yang berdaya, makmur, adil, dan sejahtera sebagaimana telah diajarkan dalam nilai-nilai universal agama Islam.

> "Bentuk dakwah kami itu bisa dilihat dalam berbagai macam peraturan daerah, dan dari situ bisa dilihat bahwa peraturan tersebut dibuat dalam rangka mencitpakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya Perda tentang perlindungan petani, Perda bantuan hukum untuk orang miskin dan lainnya.[21]

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Ahmad Heri, menurutnya bentuk-bentuk dakwah Anggota DPRD bisa dilihat dari ketiga fungsi pokok anggota DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi control. Ketiga fungsi tersebut dilakukan dalam rangka peraturan tersebut dibuat dalam rangka membela hak-hak orang-orang lemah, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Hal tersebut dilakukan dalam

---

[20] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[21] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kehidupan yang harmonis, adil dan makmur sebagaimana telah tertuang dalam Alquran dan Hadits.

> "…. dakwah riil ini ada larangan minuman beralkohol ini sudah ada ini juga terkait dengan *Amar Makruf Nahi Mungkar*. Kemudian perda tentang perjudian dan sudah berjalan, dan perda tidak menjual minuman yang beralkohol sembarangan dengan kadar alkohol yang cukup tinggi dan dipasarkan secara bebas. Hal ini untuk mempersempit ruang untuk ruang jual beli agar hal yang menimbulkan mudarat ini tidak bisa kemudian dibeli oleh masyarakat, ini tidak mau tidak sudah kategori dakwah. Larangan prostitusi contoh riilnya. Kemudian peraturan tempat hiburan malam yang di tengerai tempat transaksi seksual dan penyimpangan yang lain itu kita persempit dengan perda."[22]

> "…….bantuan hukum masyarakat miskin, perlindungan petani ini secara tidak langsung merupakan pendampingan, kepedulian kepada masyarakat yang mustadafin. Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin baru diputuskan, sedangkan bantuan perlindungan petani ini sedang diproses dalam pembahasan, dan beberapa perda yang masih dalam tahap usulan."[23]

2. Dana Pemberdayaan

Dana Pemberdayaan masyarakat merupaka bagian dari bentuk-bentuk dakwah politik, dimana anggota DPRD Jatim yang bertugas menyusun anggaran negera mampu memberikan sumbangsih terhadap pembedarayaan masyarakat yang dialokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Badrrut Tamam yang menegaskan bahwa dengan

[22] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

[23] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalokasikan dana APBD untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat miskin.

> "Dalam konteks dakwah, DPRD sebagai pengambil kebijakan di Propinsi Jatim mestinya anggarannya dialihkan kepada bagaimana kemudian masyarakat itu mendapat pemberdayaan akses modal, akses pemberdayaan dan pembangunan serta pemerataan untuk keadilan pembangunan pemberdayaan dimasing-masing daerah."[24]

Sedangkan Ahmad Heri juga memiliki pendapat yang serupa, ia menuturkan Anggota DPRD Jawa Timur harus memiliki keberpihakannya kepada rakyat miskin.

> "Misalnya ada masjid membutuhkan bantuan, ada petani yang membutuhkan modal usaha terkait dengan pelengsengan pengairan, dan lain sebagainya itu nanti kita carikan anggrannya, dan hal inilah bentuk dakwah kami. Namun juga dan itu disesuaikan kebutuhan pembangunan lainnya, seperti halnya kebutuhan pembangunan jalan desa maupun jalan kecamatan, ini adalah bentuk yang kawan-kawan di parlemen."[25]

E. Analisa Data

1. Unsur-Unsur Dakwah Politik

Pada dasarnya aktivitas anggota DPRD Jawa Timur sebagai badan legislatif daerah juga memiliki fungsi dan peran dakwah dalam mengatur sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan berbagai macam produk-produk peraturan-paraturan daerah, kebijakan-

[24] Hasil Wawancara dengan Baddrut Tamam di Kediamannya pada Tanggal 2 Juli 2015 Jam 16.30wib

[25] Hasil Wawancara dengan Achmad Heri di Kantornya pada Tanggal 5 Juli 2015 Jam 14.00 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan dan program-program yang dikeluarkannya. Hal ini bisa dilihat dari paradigma dakwah dalam setiap aktivitas mereka.

Secara teoritis—sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya—bahwa aktivitas dakwah harus terdiri dari empat unsur yaitu meliputi Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (penerima dakwah), *maudu"* (Pesan dakwah), Uslub (metode dakwah), *wasilah al-dakwah* (media dakwah), dan tujuan dakwah, maka demikian juga dalam dakwah politik.

Unsur-unsur dakwah tersebut ternyata juga ditemukan dalam dakwah politik Anggota DPRD Jatim, sehingga beberapa aktivitas mereka secara politik bisa dikategorikan dalam lingkup dakwah. Dengan kelengkapan unsur-unsur tersebut maka dakwah dan politik bukanlah dua hal yang tidak bisa disandingkan, namun demikian keduanya bisa saling melengkapi sehingga tujuan dakwah bisa dicapai secara efektif.

Dalam dakwah politik, unsur pertama adalah anggota DPRD Jatim yang dalam konteks ini mereka berkedudukan sebagai seorang da'i bagi yang lainnya. Sedangkan disisi yang lain, mereka juga bisa menjadi mad'u. Artinya adalah Anggota DPRD Jatim bisa secara sekaligus berkedudukan sebagai da'i dan mad'u bagi lainnya. Kondisi ini bisa terjadi ketika salah satu diantara mereka saling mengingatkan, bertukar pikiran, berdiskusi dalam rangka membangun citra diri yang baik dan menghasilkan produk kebijakan yang baik pula. Walaupun secara orientatif yang menjadi mad'u adalah masyarakat Jawa Timur yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan langsung dari efek dakwah politik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Jatim.

Unsur yang ketiga yaitu pesan-pesan dakwah, dalam dakwah politik, pesan-pesan dakwah yang disampaikan bisa dikategirikan kedalam bentuk-bentuk pesan moral (anti korupsi, berpihak pada rakyat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab), pesan agama (amanah dalam bertugas), pesan sosial (mengedepankan kepentingan rakyat) dan pesan politik (berpolitik dengan cara yang sehat dan dibenarkan dalam islam).

Pesan dakwah tersebut disampaikan dengan metode-metode tertentu, secara teoritis metode dakwah bisa dirangkum kedalam tiga metode utama yaitu meliputi metode *bil hikmah, bil mau'idhah hasanah,* dan *bil mujadalah*. Ketiga metode itulah yang juga digunakan dalam dakwah politik.

Sedangkan media yang digunakan dalam dakwha politik adalah cukup beragam, salah satunya adalah melalui peraturan daerah, dimana dengan menggunakan media ini dapat tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan media lainnya adalah seperti Koran, majalan, bulletin, Televisi, dan Radio.

Tujuan dakwah politik secara umum adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, harmonis, dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin.* Tujuan dakwah semacam ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan dakwah pada umumnya, namun secara spesifik dakwah politik bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang baik dalam sebuah naungan Negara dan agama.

2. Tiga Metode Dakwah Politik

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl : 125)

Ayat yang di atas menurut Enjang dan Aliyuddin merupakan prinsip utama dalam metode dakwah. Dimana menurutnya—sebagaimana dijelaskan dalam bab II—menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga metode utama yang digunakan dalam berdakwah jika didasarkan pada ayat tersebut. Ketiga metode itu adalah meliputi metode *dakwah bil hikmah, dakwah bil mauidah hasanah,* dan *dakwah bil mujadalah.* Ketiga metode utama itulah yang kemudian bisa berkembang menjadi berbagai macam metode dakwah seperti ceramah, diskusi, keteladanan, karya tulis, film, dan lain sebagainya.

Namun dalam konteks penelitian ini, dari data-data yang telah didapatkan, peneliti juga menemukan adanya ketiga metode utama tersebut dipakai dalam dakwah politik. Seperti halnya metode *dakwah bil hikmah.* Metode ini digunakan menurut Badrut Tamam dan Ahmad Heri adalah dalam rangka memberikan tekanan pada anggota DPRD agar mereka senantiasa mampu memberikan contoh-contoh yang baik dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan mengajak pada kehidupan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara bahwa para anggota DPRD Jatim seringkkali diingatkan agar supaya berhati-hati dalam mebuat kebijakan dan keputusan sehingga tidak terjebak pada kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Prilaku ini menjadi penting bagi anggota DPRD Jatim agar mereka tidak mencederai amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Karena itulah menurut Ahmad Heri, dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dilingkungan pemerintah, maka ia berupaya untuk mencegah dirinya dari prilaku korupsi. Ia juga menegaskan bahwa untuk melakukan hal yang baik maka harus dimulai dari diri sendiri baru kemudian mengajak orang lain.

Metode dakwah yang kedua yang dipakai oleh anggota DPRD Jatim adalah metode dakwah *bil mau"idhah hasanah*. Metode ini dilakukan dalam konteks dan konten yang lebih variatif. Jika mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh Badrut Tamam dan Ahmad Heri, dalam metode ini ajaran-ajaran Islam tidak disampaikan secara tersurat namun disampaikan dalam bentuk-bentuk yang tersirat, seperti halnya amanah dalam menggunakan anggaran daerah, bertanggungjawab, tidak korupsi, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan umat atau masyarakat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Dalam konteks ini antara sesama anggota DRPD Jatim dan antar Anggota DPRD Jatim dengan masyarakat juga saling mengingatkan.

Sedangkan metode yang ketiga adalah metode dakwah *bil mujadalah* (diskusi). Metode ini tentunya menjadi metode utama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diguanakan oleh anggota DPRD Jatim dalam setiap kesempatan yang ada. Hal ini tak lepas dari peran dan fungsi mereka sebagai pembuat kebijakan, peraturan, pengawasan dan penyusunan anggaran yang tentunya membutuhkan banyak energi dan wawasan untuk menyamakan persepsi dalam berbagai macam perbedaan kepetingan dan kelompok.

Dalam metode ini, upaya yang ingin dicapai oleh Badrut Tamam dan Ahmad Heri adalah untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun dalam setiap diskusi tersebut para politisi dari kalangan Islam harus berbenturan dengan berbagai macam kepentingan partai, anggota dewan, ataupun bersinggungan dengan agama-agama yang lain. Pada ruang inilah metode diskusi yang dilakukan harus dengan pendekatan-pendekatan rasional dan objektif dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sebagai pijakan dalam membangun argumentasinya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan sebuah produk hukum atau aturan yang bisa diterima oleh semua kalangan dan berdampak baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa dakwah politik merupakan wilayah *dakwah bil hal* yaitu dakwah yang mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dalam semua dimensi kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama, kareha itulah dalam dakwah politik seorang politisi harus senantiasa mengedepankan kepentingan-kepentingan ummat atau masyarakat diatas segala kepentingan yang lain. Prinsip ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya termasuk dalam metode dakwah bil hikmah, dimana dakwah dilakukan dengan cara memberikan contoh atau teladan yang baik dan membentuk kehidupan masyarakat yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam sebagai *rahmatan lil ,alamin*

3. Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Dakwah Politik

Ada berbagai macam pendekatan yang bisa dilakukan dalam dakwah, namun menurut Ali Aziz, semua pendekatan dakwah bisa dikategorikan kedalam dua kelompok besar, yaitu pertama, Pendekatan dakwah structural. Pedekatan dakwah semacam ini merupakan kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi yang ada, guna menjadikan Islam sebgai ideology negara, sehingga nilai-nilai Islam mengejewantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan relegius, dimana harus ada para politikus dalam legeslatif yang membuat undang-undang untuk menjamin kehidupan yang islami.

Pendekatan semacam ini juga digunakan dalam dakwah politik pada penlitian ini, hal ini seperti diungkapkan oleh Badrut Tamam dan Ahmad Heri, bahwa pendekatan dakwah yang mereka gunakan adalah pendekatan kultural dengan memanfaatkan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Jatim yang bertugas untuk membuat, mengotrol dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawal peraturan daerah dan penyusunan anggaran yang memihak kepada rakyat. Dakwah tersebut tidak hanya dilakukan dalam struktur mereka sebagai anggota DPRD Jatim namun juga dalam lingkungan partai mereka masing-masing.

Sedangkan pendekatan dakwah yang kedua yang digunakan dalam dakwah politik adalah dakwah kultural. Dakwah semacam ini Muhammad Shulton adalah, aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural, adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doctrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan Negara.

Pendekatan dakwah kultural inilah yang menjadi alternative bagi anggota DPRD Jatim untuk menopang pendekatan struktural yang mereka lakukan. Dalam pendekatan ini menurut Badrut Tamam dan Ahmad Heri menjelaskan pihaknya bisa menyuarakan ajakan atau kerjasama yang dengan beberapa anggota dewan lainnya untuk menggagas sebuah aturan ataupun kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pendekatan inilah para anggota dewan bisa melakukan lobi-lobi politik dalam ruang-ruang yang informal.

4. Bentuk Dakwah Politik

Dakwah tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan Islam dalam bentuk cerama atau khutbah di podium dan di mimbar saja, akan tetapi dakwah merupakan berbagai aktivitas keislaman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dorongan, percontohan, penyandaran baik barupa aktivitas lisan/tulisan maupun aktivitas badan/perbuatan nyata dalam merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang dilaksanakan oleh seluruh umat islam sesuai dengan kedudukan dan profesinya masing-masing dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan memperoleh ridha Allah.

Karena itulah setiap posisi individu dalam konteks kehidupan sosial memiliki bentuk-bentuk dakwah-dakwah yang berbeda-beda, demikian juga dengan masing-masing profesi dan struktur sosial. Sebagai Anggota DPRD Jatim yang merupakan badan legistlatif dalam sebuah negara, maka Baddrut Tamam dan Ahmad Heri juga memiliki peran untuk berdakwah dalam bentuk yang berbeda dengan para muballigh pada umumnya.

Kalau melihat pemaparan diatas, jika dilihat dalam perspektif kajian teori sebagaimana yang dijelaskan oleh Enjang dan Aliyuddin dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah,* maka bentuk-bentuk dakwah politik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Jatim dapat digolongkan dalam bentuk dakwah *Tadbir Islam* yaitu dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalaui kegiatan amal shaleh dan penataan lembaga. Hal ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk dakwah yang berupa peraturan-peraturan yang menata kehidupan masyarakat secara sosial dan kelembagaan.

Disamping itu, dakwah politik juga bisa masuk dalam kategori dakwah *Tahwir Islam* yaitu merupakan kegiatan dakwah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentransformasian ajaran Islam melalui aksi amal shaleh yang berupa pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya lingkungan, serta pengembangan ekonomi umat dalam aspek-aspek kultur yang universal.

Hal ini bisa dilihat bagaiamana para anggota DPRD merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bentuk anggaran APBD guna memberdayakan masayrakat secara umum, tak peduli mereka muslim ataupun bukan, namun secara universal pengembangan sumberdaya manusia dan alam merupakan bagian dari ajaran Islam yang *rahmatan lil „alamin.*

5. Kekurangan Dakwah Politik Anggota DPRD Jatim

Melihat penjelasan data-data dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kekurangan dan kelemahan terhadap efektifitas dakwah politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim yaitu meliputi:

a. Dakwah Politik Berbasis Konstituen

Mencermati data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya ketidak universalan dakwah politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim. Jika dilihat secara rasional bahwa duduknya para anggota partai politik menjadi Anggota DPRD Jatim tentunya tidak lepas dari peran konstituennya pemilihnya. Hal ini tentunya akan berimbas pada setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada kepentingan konstituen masing-masing.

Keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kepentingan konstituen politiknya dapat dilacak dari ideology partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing anggota DPRD Jatim yang memang memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan, disamping itu, juga bisa dilihat dari ormas yang mendukung partai-partai tersebut. Seperti halnya PKB, PPP yang banyak didukung oleh ormas Islam dari NU, sedangkan PAN konstituennya kerap didominasi oleh Ormas Islam Muhammadiyah, sedangkan partai PDI, Demokrat, Gerindra dari golongan orang-orang nasionalis. Hal ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi pada proses pembuatan kebijakan anggota DPRD Jatim.

b. Dakwah Politik Masih Kurang Efektif

Sedangkan disisi yang lain, tidak bisa dipungkiri bahwa secara umum masyarakat masih belum bisa merasakan dampak langsung dari aktivitas dakwah politik yang dilakukan oleh Angota DPRD Jatim, hal ini masih bisa dilihat dari kondisi ekonomi, keterbelakangan pendidikan, pemerataan pembangunan dan problem social lainnya seperti kejahatan, pemerkosaan, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya yang masih cukup marak terjadi di propinsi Jawa Timur.

Walaupun kebijakan-kebijakan pelarangan terhadap berbagai tindak pidana tersebut telah dikeluarkan, tapi pada prakteknya hal tersebut tidak begitu efektif. Belum lagi ditambah dengan prilaku beberapa anggota DPRD Jatim yang kerap kali terlibat kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal inilah yang kerap kali membuat beberapa kelompok masyarakat masih memangdang sebelah mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap aktivitas politik para politikus yang menjadi anggota DPRD Jatim.

c. Antara Kepentingan Politik Partai dan Dakwah Politik

Menjadi Anggota DPRD Jatim dalam konteks dakwah politik tentunya akan berhadapan dengan kepentingan politik partai yang tak jarang harus rela mengorbankan idealism dakwahnya dalam berpolitik demi mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan politik partai. Sehingga tak jarang para anggota DPRD Jatim tidak banyak berkutik ketika berhadapan dengan problem-problem masyarakat. Seperti halnya kebijakan menaikkan harga BBM, yang secara umum di tolak oleh masyarakat, namun karena hal ini berkaitan dengan kepentingan politik partai, para anggota DPRD Jatim tak banyak membantu dalam menyuarakan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Padahal dalam dakwah politik sebagaimana ditegaskan dalam bab-bab sebelumnya, berorientasi pada keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat, misi inilah yang harus tertanam kuat bagi Anggota DPRD Jatim sehingga bisa membantu mencegah adanya kebijakan-kebijakan yang memberikan beban cukup berat terhadap keberlansungan hidup masyarakat Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu pada penelitian ini, maka merujuk pada rumusan masalah yang peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Para anggota dewan memahami dakwah dan politik merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan, bahkan politik menjadi media yang strategis dalam mencapai tujuan-tujuan dakwah, karena itulah konsep dakwah politik merupakan pilihan dakwah yang paling tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.
2. Metode yang digunakan dalam dakwah politik tetap mengacu pada prinsip-prinsip dakwah dalam Islam yaitu meliputi Dakwah *Bil Hikmah* (keteladanan), Dakwah *Bil Mau"idhah Hasanah* (nasehat yang baik, dan Dakwah *Bil Mujadalah* (Diskusi yang baik). Namun dari ketiga metode tersebut yang menjadi metode utama adalah Metode *Bil Hikmah* dan *Bil Mujadalah.*
3. Sedangkan pendekatan utama yang dipakai dalam dakwah politik adalah pendekatan struktural atau pendekatan sistem, di mana para anggota DPRD Jatim berupaya melalui kebijakan-kebijakannya dapat membuat sistem kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bentuk-bentuk dari aktivitas dakwah politik oleh anggota DPRD sebenarnya lebih konkrit dan manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena bentuk-bentuk dakwah mereka tertuang dalam sebuah Peraturan-Peraturan Daerah atau kebijakan-kebiajakan tentang bantuan dana bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran terkait dengan persoalan dakwah politik yaitu meliputi:

1. Para anggota DPRD Jatim hendaknya memiliki rumusan tentang metode dakwah politik yang menjadi acuan para politisi lainnya.
2. Metode Dakwah Politik yang selama ini dilakukan masih kurang efektif, hal ini karena masih adanya pertarungan kepentingan dilingkungan parlemen tersendiri.
3. Dakwah Politik yang dipahami sebagai dakwah pemberdayaan masyarakat sifatnya masih sangat parsial, dimana anggota dewan kerap kali hanya mementingkan kepentingan konstituennya. Karena itulah dibutuhkan kesadaran bagi para anggota dewan akan tugas dan kewajibannya untuk pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.
4. Pertarungan kepentingan antar partai bisa menjadi penyebab tidak sampainya tujuan dari dakwah politik, karena itulah para politisi hendaknya lebih bijaksana dalam menyeleraskan antara kepentingan partai dengan kepentingan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dalam kajian Ilmu dakwah, dakwah politik seharusnya menjadi perhatian serius kaum akademisi, mengingat strategisnya peran politik dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui sistem kehidupan bernegara dan berbangsa yang baik. Karena itulah hendaknya para akademisi, da'i dan intelektual muda benar-benar memperhatikan dan melakukan penelitian lanjutan terkait dengan tema dakwah politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ahmad, Amrullah. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial,* Yogyakarta: Prima Duta, 1983.

Al-Wa'iy, Taufiq Yusuf. *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif,* Solo: Era Intermedia, 2003.

Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah,* Jakarta: Amzah, 2013

Anas, Ahmad. *Paradigma Dakwah Kontemporer (aplikasi teoritis dan praktis solusi problematika kekinian),* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006.

Anshari, Hafi. *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Arifin, M.. *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1977.

Arroisi, Abdurahman. *Laju Zaman Menentang Dakwah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Ary, Donald. et.al., *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (diterjemahkan oleh Arief Furchan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah,* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Bahri Day, Syamsul. Hubungan Politik dan Dakwah, *Jurnal Mediator, Vol. 6, No. 1 Juni, 2005.*

Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (*Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012.

Burlian, Paisol, Harmonisasi Jalinan Dakwah dan Politik Hukum Tata Negara, *Jurnal Wardah : No. XXVII/Th. XV/ Juni 2014. 17-31*

Don, Abdul Ghafar, *Integrasi Politik dan Dakwah* dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed), *Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Cet.19, Bandung: PT Remaja Rasdakarya, 2005

Enjang dan Aliyuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, Pendekatan Filosofis dan Praktis*, Bandung: Widya Padjdjaran, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esposito, John L. *Islam and Politics* (*fourth edition*), New York: University Press Syracuse, 1998.

Ghani, Zulkiple Abd. dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed). *Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia,* Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset 1990.

Hajar, Ibnu, *Kiai di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2009) Cet. Ke-1.

Hamid, Abd.. *Al-da'wah Fi Ingkar Al-Muankar*, Kuwait: Dar al-Dakwa,1989.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.

Hasyimi (A.). *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani : Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan,* Medan: IAIN Press, 2010

Issawi, Charles., *An Arab Philosophy of History.* (Terj.) A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas, 1976.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam,* Bandung : Mizan, 1997.

Lathief, HMS., dan Nasaruddin. *Teori dan Praktek Dakwah*, Jakarta: Firma Dara, 1980.

Luth, Thoir. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya,* cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Membumikan Al-Qur'an,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Ma'luf, Lois. *Munjid al-Lughah wa A'lam*, Beirut : Dar Fikr, 1986.

Mahalli (Al), Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalâlain,* Surabaya: Maktabah Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, 1414H.

Maliki, Muhammad Alwi. *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas*, Jogyakarta: eLSQ Press, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhidin, Asep, *Dakwah dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Mulkhan, Abdul Munir., *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta: Sipress, 1993.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, cet. Ke-14, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir,* Jakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid (Al), Ali bin Shalih. *Mustalzamat al-Da'wah fi al-'Ashr al-Hadhir*, Beirut: Dar al-Fikr 1989.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Natsir, M,. *Fiqhud Dakwah*. Jakarta: Islamiah Indonesia, tth.

Nuwairah, Nahed. Dakwah dan Politik dalam Pandangan Abul A'la Al-Maududi, *Jurnal Al Hadharah Vol. 10, No. 19, Januari-Juni 2011.*

Omar, Toha Yahya. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Wijaya, 1979.

Qaththan (al), Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an,* terjemah Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta, LkiS, 2008.

Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995.

Rauf, Abdul Kadir Sayid Abd. *Dirasat fi da'wah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Tiba'ah al-Mahmadiyah, 1987

Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

Saputra, Munzier, Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, edisi Revisi, Jakarta: Rahmad Semesta, 2006.

Salim, Abdul Muin. (2002). *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Shiddieqy (Ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Edisi ketiga. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah,* volume 6, Cet ke-2, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

----------. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan 22, Bandung : Mizan, 2001.

Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sodiqin, Ali. *Antropologi al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Subandi, Ahmad. *Ilmu Dakwah Pengantar ke Arah Metodologi,* Bandung: Yayasan Syahida, 1994.

Sudjana, *Islam Fungsional,* Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Rosdakarya, 2007.

Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Suparta, Munzir. *Metode Dakwah*, Cet Ke-1, Jakarta : Putra Grafik, 2003.

Suprayogo, Imam, et.al,. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta, PT. Gramedia, 1992.

Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penenlitian,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Baru Pertama, 1997.

Widjaja. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ya'qub, Hamzah. *Publisistik Islam, Seni dan Teknik Dakwah*, Bandung: CV Diponegoro, 1973.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah,* Bandung : Mizan, 1992.

Yakub, Ali Mustafa. *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi,* Jakarata : Pustaka Firdaus, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id